

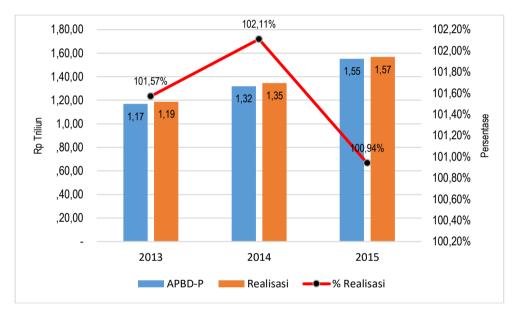
Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA APBD

Realisasi Pendapatan Tahun 2015 sebesar Rp1.567.587.735.546,00 atau mencapai 100,94% dari target sebesar Rp1.553.002.797.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp215.622.047.787,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.276.731.977.599,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp75.233.710.160,00.

Realisasi Pendapatan Tahun 2015 mengalami kenaikan Rp221.965.939.868,00 atau naik **16,50%** dari realisasi Tahun 2014. Perkembangan realisasi Pendapatan tahun 2013-2015 terlihat pada grafik di bawah.



Gambar 5.1 Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2015

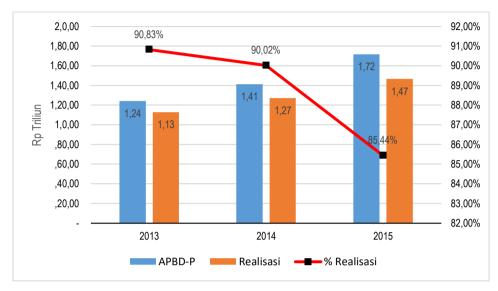
Realisasi Belanja Tahun 2015 sebesar Rp1.298.154.429.988,00 atau mencapai 83,89% dari anggaran sebesar Rp1.547.369.796.000,00. Realisasi Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.127.508.649.942,00, Belanja Modal sebesar Rp170.645.780.046,00, sementara Belanja Tidak Terduga tidak ada yang direalisasikan. Realisasi Belanja Tahun 2015 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp77.245.268.596,00 atau 6,33% dari realisasi Tahun 2014.

Realisasi Transfer Tahun 2015 sebesar Rp 167.988.791.740,00 atau mencapai 99,74% dari anggaran sebesar Rp168.420.888.000,00. Realisasi Transfer tersebut terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp4.467.762.000,00 dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp 163.521.029.740,00. Dibandingkan realisasi Transfer Tahun 2014, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp116.158.321.230,00 atau naik 224,11%.



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Perkembangan realisasi Belanja dan Transfer tahun 2013-2015 terlihat pada grafik di bawah.



Gambar 5.2 Grafik. Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2013-2015

Dari realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer tersebut, maka pada Tahun 2015 terdapat surplus sebesar Rp101.444.513.818,00.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2015 adalah sebesar Rp198.133.252.846,00 sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2015 mencapai Rp35.150.547.188,00 sehingga Pembiayaan Netto Tahun 2015 adalah sebesar Rp162.982.705.658,00.

Dengan adanya surplus anggaran sebesar Rp101.444.513.818,00 dan Pembiayaan Netto sebesar Rp162.982.705.658,00, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2015 sebesar Rp264.427.219.476,00.

Tabel 5.1 Ringkasan Realisasi APBD Tahun 2015

2015		%
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	-
1.553.002.797.000,00	1.567.587.735.546,00	100,94
1.547.369.796.000,00	1.298.154.429.988,00	83,89
168.420.888.000,00	167.988.791.740,00	99,74
(162.787.887.000,00)	101.444.513.818,00	(62,32)
196.791.609.000,00	198.133.252.846,00	100,68
34.003.722.000,00	35.150.547.188,00	103,37
162.787.887.000,00	162.982.705.658,00	100,12
-	264.427.219.476,00	
	Anggaran (Rp) 1.553.002.797.000,00 1.547.369.796.000,00 168.420.888.000,00 (162.787.887.000,00) 196.791.609.000,00 34.003.722.000,00 162.787.887.000,00	Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 1.553.002.797.000,00 1.567.587.735.546,00 1.547.369.796.000,00 1.298.154.429.988,00 168.420.888.000,00 167.988.791.740,00 (162.787.887.000,00) 101.444.513.818,00 196.791.609.000,00 198.133.252.846,00 34.003.722.000,00 35.150.547.188,00 162.787.887.000,00 162.982.705.658,00

Penjelasan secara rinci atas masing-masing akun Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

a. PENDAPATAN - LRA

Rp1.567.587.735.546,00

Realisasi Pendapatan – LRA Tahun 2015 sebesar Rp1.567.587.735.546,00 atau mencapai 100,94% dari target dalam APBD-P Tahun 2015 sebesar Rp1.553.002.797.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp215.622.047.787,00 (112,89%), Pendapatan Transfer sebesar Rp1.276.731.977.599,00 (99,17%), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp75.233.710.160,00 (100,84%).

Jika dibandingkan dengan Tahun 2014, realisasi Pendapatan - LRA Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp220.781.247.485,00 atau naik **16,50%** sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan - LRA Tahun 2015

	2014		2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
PAD	191.000.241.000,00	215.622.047.787,00	202.593.689.614,00
Pendapatan Transfer	1.287.394.175.000,00	1.276.731.977.599,00	1.136.928.031.787,00
Lain-lain PD yang Sah	74.608.381.000,00	75.233.710.160,00	6.100.074.277,00
Jumlah	1.553.002.797.000,00	1.567.587.735.546,00	1.345.621.795.678,00

Persentase peningkatan terbesar berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang mengalami peningkatan sebesar Rp69.133.635.883,00 atau naik 1.233,32% dari realisasi Tahun 2014.

1) Pendapatan Asli Daerah_

Rp215.622.047.787,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp215.622.047.787,00 atau 112,89% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2015 sebesar Rp191.000.241.000,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut memberikan kontribusi sebesar 13,76% dari total Pendapatan – LRA Tahun 2015.

Jika dibandingkan realisasi Tahun 2014, angka tersebut meningkat sebesar Rp13.028.358.173,00 atau 6,43% sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015

20	15	2014
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(2)	(4)	(5)
33.946.120.000,00	40.706.899.014,00	37.837.517.809,00
31.644.926.000,00	32.628.448.046,00	33.296.583.424,00
12.008.086.000,00	12.306.370.791,00	12.016.649.479,00
113.401.109.000,00	129.980.329.936,00	119.442.938.902,00
191.000.241.000,00	215.622.047.787,00	202.593.689.614,00
	Anggaran (Rp) (2) 33.946.120.000,00 31.644.926.000,00 12.008.086.000,00 113.401.109.000,00	(2) (4) 33.946.120.000,00 40.706.899.014,00 31.644.926.000,00 32.628.448.046,00 12.008.086.000,00 12.306.370.791,00 113.401.109.000,00 129.980.329.936,00

Pencapaian PAD Tahun 2015 yang melebihi target dan mengalami peningkatan dari Tahun 2014 menggambarkan bahwa kebijakan optimalisasi PAD yang



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga cukup berhasil untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015.

a) Pajak Daerah

Rp40.706.899.014,00

Pajak Daerah merupakan PAD yang jenis dan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah di Kabupaten Purbalingga hanya dikelola oleh 1 (satu) SKPD yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015 sebesar Rp40.706.899.014,00 atau 119,92% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD-Perubahan Tahun 2015 sebesar Rp33.946.120.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2015

Uraian	2015		2014
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)
Pajak Hotel	272.040.000,00	301.703.060,00	315.990.844,00
Pajak Restoran	1.234.700.000,00	2.076.379.539,00	1.832.238.025,00
Pajak Hiburan	2.490.380.000,00	2.456.613.600,00	2.987.396.751,00
Pajak Reklame	600.000.000,00	774.531.967,00	744.746.053,00
Pajak Penerangan Jalan	11.594.000.000,00	14.616.307.873,00	13.072.361.235,00
Pajak Parkir	55.000.000,00	50.526.334,00	57.675.383,00
Pajak Air Tanah	700.000.000,00	854.307.288,00	925.994.605,00
Pajak MBL dan Batuan	400.000.000,00	1.494.565.027,00	331.436.110,00
Pajak Bumi dan Bangunan	13.800.000.000,00	14.103.898.318,00	14.028.107.516,00
BPHTB	2.800.000.000,00	3.978.066.008,00	3.541.571.287,00
Jumlah	33.946.120.000,00	40.706.899.014,00	37.837.517.809,00

b) Retribusi Daerah_

Rp32.628.448.046,00

Retribusi Daerah merupakan PAD yang jenis dan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah di Kabupaten Purbalingga dikelola oleh 36 SKPD.

Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2015 mencapai sebesar Rp32.628.448.046,00 atau 103,11% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.5 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2015

	2015		2014
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	18.758.406.000,00	18.841.406.008,00	21.518.848.559,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	310.200.000,00	346.301.300,00	343.640.700,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil	-	-	54.642.500,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	3.300.000,00	1.099.000,00	1.223.500,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00	726.525.000,00	570.235.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	3.867.800.000,00	3.951.114.192,00	2.930.134.500,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	500.000.000,00	530.569.480,00	500.856.240,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	860.000.000,00	1.167.784.633,00	1.288.776.125,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.206.450.000	2.403.253.360	1.928.156.505,00
Retribusi Terminal	792.210.000	801.228.445	763.103.810,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.003.200.000	1.174.522.000	700.115.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	76.650.000	82.203.000	100.673.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	750.000.000	832.141.500	694.524.400,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	601.804.000	588.440.550	621.230.200,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	575.000.000,00	633.171.360,00	630.556.155,00
Retribusi Izin Gangguan	429.906.000,00	405.446.218,00	506.772.230,00
Retribusi Izin Trayek	160.000.000,00	143.242.000,00	143.095.000,00
Total	31.644.926.000,00	32.628.448.046,00	33.296.583.424,00

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp12.306.370.791,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten yang berupa bagian laba (dividen) pada perusahaan daerah/BUMD, baik yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas maupun biaya.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai sebesar Rp12.306.370.791,00 atau 102,41% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2015

	2015		2014
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	12.008.086.000,00	12.306.370.791,00	12.016.649.479,00
Jumlah	12.008.086.000,00	12.306.370.791,00	12.016.649.479,00

Jika dibandingkan dengan Tahun 2014, realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD tersebut mengalami



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

peningkatan sebesar Rp289.721.312,00 atau naik 2,41%. Total dividen tersebut berasal dari enam BUMD sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.7 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari masing-masing BUMD Tahun 2015

•	2015		2014
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
PDAM	2.161.510.000,00	2.500.151.313,00	2.161.510.905,00
PD BPR BKK Purbalingga	2.082.667.000,00	2.483.413.198,00	1.327.870.000,00
PD BPRS Buana Mitra Perwira	439.983.000,00	439.074.000,00	2.083.463.970,00
PD Owabong	2.742.738.000,00	1.969.329.622,00	439.983.000,00
PT BPD Jateng	3.253.318.000,00	3.307.032.658,00	2.742.738.129,00
PD BPR Artha Perwira	1.327.870.000,00	1.607.370.000,00	3.261.083.475,00
Jumlah	12.008.086.000,00	12.306.370.791,00	12.016.649.479,00

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah_____Rp129.980.329.936,00

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber yang bersifat non rutin dan tidak terkait dengan tugas dan fungsi utama dari SKPD.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp129.980.329.936,00 atau 114,62% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD-Perubahan Tahun 2015 sebesar Rp113.401.109.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.8 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2015

	2015		2014
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	250.000.000,00	642.644.641,00	202.527.800,00
Penerimaan Jasa Giro	2.500.000.000,00	4.659.887.425,00	4.607.135.319,00
Pendapatan Bunga	8.000.000.000,00	21.382.831.953,00	12.979.661.017,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	511.101.971,00	727.663.246,00
Pendapatan Denda Pajak	-	5.989.003,00	10.189.324,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	1.195.160.150,00
Pendapatan dari Pengembalian	-	965.871.850,00	1.409.446.811,00
Pendapatan BLUD	65.000.000.000,00	64.489.012.974,00	75.371.192.235,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	1.341.619,00	-
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	24.000.000,00	18.361.000,00	21.028.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	37.465.052.000,00	37.141.230.500,00	22.616.409.000,00
Pendapatan dari Jamkesda	162.057.000,00	162.057.000,00	302.526.000,00
Total	113.401.109.000,00	129.980.329.936,00	119.442.938.902,00

- (1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan merupakan hasil penjualan asset-aset yang sudah tidak produktif lagi baik yang berupa peralatan dan mesin maupun hasil bongkaran gedung bangunan.
- (2) Penerimaan jasa giro merupakan penerimaan bunga rekening giro kas daerah, rekening bendahara SKPD, dan jasa giro dana cadangan.



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

- (3) Pendapatan bunga merupakan penerimaan bunga deposito Pemerintah Daerah pada Bank BPD Jawa Tengah, Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN.
- (4) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya merupakan pendapatan lain-lain yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu jenis pendapatan yang ada. Jenis pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya diantaranya berasal dari kelebihan setoran sisa TUP Tahun 2014 dan 2015 pada beberapa SKPD.

2) Pendapatan Transfer

Rp1.276.731.977.599,00

Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.276.731.977.599,00 atau 99,17% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2015 sebesar Rp1.287.394.175.000,00. Realisasi pendapatan transfer tersebut memberikan kontribusi sebesar 81,51% dari total Pendapatan Daerah Tahun 2015.

Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp139.803.945.812,00 atau naik 12,30% dibandingkan realisasi Tahun 2014 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.9 Realisasi Pendapatan Tranfer Tahun 2015

Una!an	2015		2014
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat	910.536.775.000,00	901.365.883.755,00	830.569.180.496,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	249.255.085.000,00	249.255.085.000,00	173.720.857.000,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	86.793.098.000,00	91.414.187.161,00	64.285.869.000,00
Bantuan Keuangan	40.809.217.000,00	34.696.821.683,00	30.544.262.910,00
Total	1.287.394.175.000,00	1.276.731.977.599,00	1.099.120.169.406,00

a) Transfer Pemerintah Pusat __

__Rp901.365.883.755,00

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp901.365.883.755,00 atau 98,99% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD-Perubahan Tahun 2015 sebesar Rp910.536.775.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.10 Realisasi Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat Tahun 2015

Uraian	20	15	2014
Uralan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Bagi Hasil Pajak	23.961.765.000,00	17.263.378.750,00	26.851.773.288,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	6.169.411.000,00	6.628.446.005,00	6.268.440.589,00
Dana Alokasi Umum	805.222.229.000,00	805.222.229.000,00	777.989.499.000,00
Dana Alokasi Khusus	75.183.370.000,00	72.251.830.000,00	57.267.330.000,00
Total	910.536.775.000,00	901.365.883.755,00	868.377.042.877,00

P O T

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Bagi Hasil Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Penghasilan, yang terdiri dari:

Tabel 5.11 Realisasi Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat Tahun 2015

Harian —	2015		2014
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Bagi Hasil Pajak	23.961.765.000,00	17.263.378.750,00	26.851.773.288,00
Bagi Hasil dari PBB sektor Pertambangan	12.948.705.000,00	10.308.034.750,00	17.151.380.280,00
Bagi Hasil dari PBB sektor Perkebunan	-	4.655.000,00	-
Bagi Hasil dari PBB sektor Perhutanan	-	342.853.000,00	-
Bagi Hasil dari PPh	11.013.060.000,00	6.607.836.000,00	9.700.393.008,00

(2) Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Rp6.628.446.005,00

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri terdiri dari:

Tabel 5.12 Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2015

United	2015		2014
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6.169.411.000,00	6.628.446.005,00	6.268.440.589,00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	350.715.000,00	171.750.925,00	455.321.744,00
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	915.093.000,00 113.766.000.00	703.264.033,00 57.172.500.00	383.182.410,00 274.648.799.00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	-	22.463.700,00	56.578.713,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	34.975.000,00	25.262.197,00	30.860.333,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	17.315.000,00	26.900.686,00	54.300.798,00
Bagi Hasil dari Cukai Tembakau	4.737.547.000,00	5.621.631.964,00	5.013.547.792,00

(3) Dana Alokasi Umum Rp805.222.229.000,00

Besarnya penerimaan DAU yang diterima oleh Kabupaten Purbalingga di Tahun 2015 sebesar Rp805.222.229.000,00, meningkat sebesar Rp86.037.209.000,00 atau 11,96% dibandingkan realisasi Tahun 2014.

(4) Dana Alokasi Khusus Rp72.251.830.000,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Jumlah alokasi DAK yang diterima Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 sebesar Rp72.251.830.000,00 atau sebesar 96,10% dari target, meningkat sebesar Rp14.984.500.000,00 atau 26,17% dari penerimaan di Tahun 2014.

Rincian penerimaan DAK Tahun 2015 sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.13 Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2015

Uraian	20	2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Dana Alokasi Khusus	75.183.370.000,00	72.251.830.000,00	57.267.330.000,00
DAK Bidang Infrastruktur Jalan	6.678.670.000,00	6.678.670.000,00	5.780.720.000,00
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	3.667.860.000,00	3.667.860.000,00	2.878.650.000,00
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	2.856.790.000,00	2.856.790.000,00	2.106.110.000,00
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	1.913.770.000,00	1.913.770.000,00	1.330.990.000,00
DAK Bidang Keluarga Berencana	1.296.670.000,00	1.296.670.000,00	996.910.000,0
DAK Bidang Kehutanan	1.175.770.000,00	1.175.770.000,00	1.062.190.000,00
DAK Bidang Kesehatan	5.172.830.000,00	5.172.362.000,00	6.391.770.000,0
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	2.708.440.000,00	2.708.440.000,00	2.410.380.000,0
DAK Bidang Perdagangan	1.587.420.000,00	1.587.420.000,00	
DAK Bidang Lingkungan Hidup	1.248.180.000,00	1.248.180.000,00	1.044.940.000,0
DAK Bidang Pertanian	20.472.560.000,00	17.541.020.000,00	5.606.180.000,0
DAK Bidang Pendidikan	25.968.980.000,00	25.969.448.000,00	27.161.500.000,0
DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat	435.430.000,00	435.430.000,00	496.990.000,0

b) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Rp 249.255.085.000,00

Penerimaan dana Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Pada Tahun 2015 merupakan Dana Penyesuaian yang terdiri dari Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun 2015 sebesar Rp249.255.085.000,00. Nilai tersebut berupa realisasi Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.14 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun 2015

Annessen (Dn)	2015		2014
Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Tunjangan Profesi Guru PNSD	248.495.085.000,00	248.495.085.000,00	173.211.107.000,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	760.000.000,00	760.000.000,00	509.750.000,00
Jumlah	249.255.085.000,00	249.255.085.000,00	173.720.857.000,00

c) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya____

_Rp91.414.187.161,00

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan dana transfer yang berasal dari bagi hasil atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 94 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dana bagi hasil lainnya.

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp91.414.187.161,00 atau 105,32% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD-Perubahan Tahun 2015 sebesar Rp86.793.098.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

P O T

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.15 Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2015

Harian	2015		2014
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	86.793.098.000,00	91.414.187.161,00	64.269.725.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	16.144.000,00
Total	86.793.098.000,00	91.414.187.161,00	64.285.869.000,00

Adapun rekening pendapatan bagi hasil pajak merupakan rekening untuk menampung Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2015. Adapun rincian bagi hasil pajak Tahun 2015 terdiri dari:

Tabel 5.16 Realisasi Transfer Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2015

Uraian	2015		2014
Oraldii	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	86.793.098.000,00	91.414.187.161,00	64.269.725.000,00
Bagi Hasil Dari PKB	15.792.302.000,00	16.995.890.479,00	15.274.133.282,00
Bagi Hasil Dari BBNKB	27.066.178.000,00	16.676.003.682,00	18.381.403.756,00
Bagi Hasil Dari PBBKB	21.914.104.000,00	21.615.496.521,00	18.603.761.778,00
Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	20.514.000,00	25.107.407,00	29.968.048,00
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	22.000.000.000,00	36.101.689.072,00	11.980.458.136,00

Sesuai dengan surat Kepala DPPAD Provinsi Jawa Tengah Nomor 971.1/107512 tanggal 31 Maret 2016, terdapat kurang salur bagi hasil Provinsi kepada Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2015 sebesar Rp4.824.802.624,00. Atas kurang salur tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mencatat adanya piutang Pendapatan Transfer sebagaimana dijelaskan dalam poin 3.b.2.a.3.d.

d) Bantuan Keuangan

_Rp34.696.821.683,00

Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2015 berasal dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp34.696.821.683,00 atau 85,02% dari anggaran.

Tabel 5.17 Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Tahun 2015

Uraian	2015		2014
Oraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	40.809.217.000,00	34.696.821.683,00	30.560.406.910,00
Total	40.809.217.000,00	34.696.821.683,00	30.560.406.910,00

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah_____

Rp75.233.710.160,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2015 seluruhnya berasal dari hibah yaitu sebesar Rp75.233.710.160,00 atau 100,84% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2015 sebesar Rp74.608.381.000,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp69.133.635.883,00 atau naik 1.133,32%.

Tabel 5.18 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2015

Herian	2015		2014
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah	8.001.408.000,00	8.626.737.160,00	6.100.074.277,00
Pendapatan Lainnya	66.606.973.000,00	66.606.973.000,00	-
Total	74.608.381.000,00	75.233.710.160,00	6.100.074.277,00

a) **Pendapatan Hibah**

Rp8.626.737.160,00

Realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp8.626.737.160,00 atau 107,82% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2015 sebesar Rp8.001.408.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.526.662.883,00 atau naik 41,42% sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.19 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Hibah Tahun 2015

Uraian	2015		2014
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	8.001.408.000,00	8.426.748.250,00	6.037.073.150,00
Pemerintah	8.001.408.000,00	8.426.748.250,00	6.037.073.150,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	-	199.988.910,00	63.001.127,00
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	-	175.000.000,00	-
Sumbangan Pihak Ketiga	-	24.988.910,00	63.001.127,00
Total	8.001.408.000,00	8.626.737.160,00	6.100.074.277,00

- (1) Pendapatan Hibah Pemerintah terdiri dari:
 - Hibah kepada PDAM sebesar Rp6.774.000.000,00;
 - Hibah untuk pelaksanaan implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan sebesar Rp240.922.000,00;
 - Hibah Program Water Resource and Irrigation Sector Management Projects (WISMP) untuk pembuatan sarana dan prasarana irigasi sebesar Rp1.411.826.250,00.
- (2) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri Terdiri dari pendapatan hibah dari Bank BPD Jawa Tengah kepada SMK Negeri 2 Purbalingga sebesar Rp175.000.000,00 dan Sumbangan Pihak Ketiga terkait dengan pekerjaan perencanaan, konstruksi, pengawasan maupun pemeliharaan di lingkungan Kabupaten Purbalingga sebesar Rp24.988.910,00.



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

b) Pendapatan Lainnya______Rp66.606.973.000,00

Pendapatan Lainnya merupakan realisasi pendapatan Dana Desa Tahun 2015.

b. BELANJA

_Rp1.298.154.429.988,00

Realisasi Belanja Tahun 2015 sebesar Rp1.298.154.429.988,00 atau mencapai 83,89% dari anggaran sebesar Rp1.547.369.796.000,00. Dibandingkan realisasi Tahun 2014, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp77.245.268.596,00 atau naik 6,33%.

Tabel 5.20 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015

Uraian	20	2015	
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Operasi	1.312.278.571.000,00	1.127.508.649.942,00	1.108.659.494.106,00
Belanja Modal	233.091.225.000,00	170.645.780.046,00	112.249.667.286,00
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	-	-
Jumlah	1.547.369.796.000,00	1.298.154.429.988,00	1.220.909.161.392,00

1) Belanja Operasi_

_Rp1.127.508.649.942,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.127.508.649.942,00 atau 85,92% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2015 sebesar Rp1.312.278.571.000,00. Belanja Operasi tersebut merupakan 86,85% dari total Belanja Tahun 2015.

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp19.749.155.836,00 atau naik 1,78%, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.21 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2015

Harina	20	2015	
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	907.284.110.000,00	799.174.678.554,00	760.008.721.885,00
Belanja Barang dan Jasa	339.541.355.000,00	291.181.724.153,00	294.872.761.866,00
Belanja Bunga	24.688.000,00	9.504.569,00	17.095.745,00
Belanja Subsidi	500.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00
Belanja Hibah	60.018.418.000,00	32.210.642.689,00	44.328.185.710,00
Belanja Bantuan Sosial	4.910.000.000,00	4.432.099.977,00	8.132.728.900,00
Total	1.312.278.571.000,00	1.127.508.649.942,00	1.107.759.494.106,00

Belanja Pegawai masih menjadi kontributor terbesar terhadap total Belanja Operasi dengan nilai Rp799.174.678.554,00 atau 70,88% dari Belanja Operasi.



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

a) Belanja Pegawai

Rp799.174.678.554,00

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp799.174.678.554,00 atau 88,08% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2015 sebesar Rp907.284.110.000,00. Jumlah Belanja Pegawai tersebut merupakan 61,56% dari total Belanja Daerah Tahun 2015. Rincian Belanja Pegawai Tahun 2015 terdiri dari:

Tabel 5.22 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2015

Uraian	20)15	2014
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan	569.843.651.000,00	537.396.164.120,00	505.813.147.478,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	24.354.788.000,00	22.573.777.500,00	18.502.800.000,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.395.120.000,00	4.202.860.000,00	4.157.060.000,00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.697.306.000,00	1.685.879.900,00	1.520.448.125,00
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	808.862.000,00	563.464.689,00	348.819.076,00
Belanja Honorarium PNS	17.240.452.000,00	14.388.086.500,00	12.232.999.166,00
Belanja Honorarium Non PNS	23.628.700.000,00	21.729.823.250,00	18.560.852.750,00
Uang Lembur	1.665.265.000,00	1.052.620.065,00	1.843.866.225,00
Penghasilan Lainnya	257.935.072.000,00	193.565.421.030,00	192.142.786.300,00
Belanja Pegawai BLUD	5.714.894.000,00	2.016.581.500,00	4.885.942.765,00
Total	907.284.110.000,00	799.174.678.554,00	760.008.721.885,00

Sesuai dengan Lampiran III Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Belanja Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, dan Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat disajikan di kelompok Belanja Barang dan Jasa.

Namun jika mengacu kepada Buletin Teknis SAP Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, seluruh kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal harus dianggarkan dan dilaporkan dalam kelompok rekening Belanja Pegawai, termasuk di dalamnya adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai baik yang sudah berstatus sebagai PNS maupun berstatus Non PNS.

Oleh karena itu, dalam LKPD Tahun 2015 ini, Belanja Honorarium PNS dan Honorarium Non PNS tetap disajikan dalam kelompok Belanja Pegawai dan



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

bukan Belanja Barang dan Jasa. Sehingga hanya belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang akan disajikan pada kelompok Belanja Barang dan Jasa sesuai dengan Lampiran III Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Tabel 5.23 Realisasi Belanja Honorarium PNS dan Non PNS Tahun 2015

Harian	20	15
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Honorarium PNS	17.240.452.000,00	14.388.086.500,00
Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.752.942.000,00	10.223.663.800,00
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	470.700.000,00	368.750.000,00
Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	-
Belanja Honorarium PNS Lainnya	2.880.000,00	-
Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	312.000.000,00	312.000.000,00
Belanja Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	288.165.000,00	203.625.000,00
Belanja Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	3.413.765.000,00	3.280.047.700,00
Belanja Honorarium Non PNS	23.628.700.000,00	21.729.823.250,00
Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	11.520.890.000,00	10.911.385.750,00
Belanja Upah Harian	2.898.344.000,00	2.396.684.000,00
Belanja Upah Bulanan	8.865.660.000,00	8.100.507.500,00
Belanja Honorarium Kader Jamkesda	38.046.000,00	38.046.000,00
Belanja Honorarium Kader Posyandu	305.760.000,00	283.200.000,00
Total	40.869.152.000,00	36.117.909.750,00

Penghasilan lainnya berupa Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi.

b) Belanja Barang dan Jasa_

Rp291.181.724.153,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2015 sebesar Rp291.181.724.153,00 atau 85,76% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2015 sebesar Rp339.541.355.000,00. Jumlah Belanja Barang dan Jasa tersebut merupakan 22,43% dari total Belanja Daerah Tahun 2015. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut tidak termasuk Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat dan Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan Lampiran III.B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat dikonversikan sesuai SAP ke dalam kelompok Belanja Hibah sedangkan Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dikonversikan ke dalam kelompok Belanja Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp11.926.574.870,00 atau 36,76% dari anggaran sebesar



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Rp32.448.453.000,00 sedangkan realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp265.000.000,00 atau 94,14% dari anggaran sebesar Rp281.500.000,00.

Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 5.24 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2015

Uraian)15	Selisih Lebih /
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Kurang)
Belanja Bahan Pakai Habis	12.477.463.000,00	9.748.475.740,00	(2.728.987.260,00)
Belanja Bahan/Material	19.856.925.000,00	15.771.582.918,00	(4.085.342.082,00)
Belanja Jasa Kantor	63.778.968.000,00	57.741.999.354,00	(6.036.968.646,00)
Belanja Premi Asuransi	853.010.000,00	778.889.171,00	(74.120.829,00)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.739.280.000,00	9.637.381.179,00	(3.101.898.821,00)
Belanja Cetak dan Penggandaan	6.331.529.000,00	4.954.167.815,00	(1.377.361.185,00)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	618.420.000,00	346.430.000,00	(271.990.000,00)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	680.000.000,00	572.954.000,00	(107.046.000,00)
Belanja Sewa Alat Berat	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.384.717.000,00	1.140.219.244,00	(244.497.756,00)
Belanja Makanan dan Minuman	19.961.158.000,00	16.266.470.197,00	(3.694.687.803,00)
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	417.244.000,00	373.889.500,00	(43.354.500,00)
Belanja Pakaian Kerja	629.013.000,00	617.099.500,00	(11.913.500,00)
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.392.043.000,00	777.365.400,00	(614.677.600,00)
Belanja Perjalanan Dinas	24.894.626.000,00	20.728.518.079,00	(4.166.107.921,00)
Belanja Pemeliharaan	87.435.214.000,00	81.439.970.880,00	(5.995.243.120,00)
Belanja Jasa Konsultansi	3.440.568.000,00	3.115.781.200,00	(324.786.800,00)
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	374.000.000,00	269.000.000,00	(105.000.000,00)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.426.582.000,00	4.003.317.105,00	(423.264.895,00)
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.225.000,00	3.900.000,00	(325.000,00)
Belanja Barang Dana BOS	5.844.996.000,00	4.377.983.000,00	(1.467.013.000,00)
Belanja Barang dan Jasa - Dana BLUD	71.995.374.000,00	58.516.329.871,00	(13.479.044.129,00)
Total	339.541.355.000,00	291.181.724.153,00	(48.359.630.847,00)

c) Belanja Bunga

Rp9.504.569,00

Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp9.504.569,00 merupakan pembayaran Bunga dan Jasa Bank Pinjaman ke Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman ADB Loan Agreement No. 1198-INO yang jatuh tempo pada 31 1 Januari 2015 dan Juli 2015. Dengan pembayaran utang bunga tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah tidak mempunyai utang bunga di tahun 2016.

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.25 Realisasi Belanja Bunga Tahun 2015

-	2015		2014
_	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	24.688.000,00	9.504.569,00	17.095.745,00
Jumlah	24.688.000,00	9.504.569,00	17.095.745,00

d) Belanja Subsidi_

Rp500.000.000,00

Realisasi Belanja Subsidi sebesar Rp500.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2015 sebesar Rp500.000.000,00. Belanja Subsidi tersebut merupakan belanja subsidi bunga bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Tabel 5.26 Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2015

Uraian	2015		2014
Uraidii	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Subsidi Bunga kepada UMKM	500.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00
Total	500.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00

e) Belanja Hibah___

Rp32.210.642.689,00

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2015 sebesar Rp32.210.642.689,00 atau 53,67% dari anggaran dalam APBD-P Tahun 2015, yang terdiri dari:

Tabel 5.27 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2015

- Ilmaina	20	2015	
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Belanja Hibah kepada	2.501.974.000,00	2.465.874.000,00	3.522.540.000,00
Kelompok Masyarakat	-	-	3.189.756.550,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	2.305.000.000,00	2.136.031.127,00	6.414.463.200,00
anja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar Belanja Hibah Pemilu Kepala	100.000.000,00	100.000.000,00	1.408.467.000,00
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Belanja Barang Untuk	22.662.991.000,00	15.582.162.692,00	-
Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	32.448.453.000,00	11.926.574.870,00	29.792.958.960,00
Total	60.018.418.000,00	32.210.642.689,00	44.328.185.710,00

(1) Hibah kepada Pemerintah merupakan hibah kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Purbalingga, terdiri dari:



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.28 Realisasi Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal Tahun 2015

Penerima Hibah	Jumlah
Hibah kepada Kodim 0702	1.462.640.000,00
Hibah kepada Pangkalan TNI AU Wirasaba	118.300.000,00
Hibah kepada Polres Purbalingga	884.934.000,00
Total	2.465.874.000,00

- (2) Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non professional. Pada Tahun 2015, tidak ada Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat yang direalisasikan disebabkan karena adanya Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa belanja hibah dapat diberikan kepada (a) Pemerintah Pusat; (b) Pemerintah Daerah lain; (c) badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau (d) badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
 - Kelompok masyarakat di Purbalingga yang berbadan hukum Indonesia relatif sangat sedikit sehingga sampai akhir tahun tidak ada Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat yang berhasil direalisasikan.
- (3) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan terealisasi 92,67% atau Rp2.136.031.127,00 dari anggaran Rp2.305.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014, terjadi penurunan sebesar Rp4.278.432.073,00 (66,69%). Rincian Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2015 sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.29 Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2015

Uraian	2015		Selisih	
Oraidii	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang)	
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pemuda dan Olah Raga	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-	
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Koperasi dan UMKM	30.000.000,00	29.781.593,00	(218.407,00)	
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	150.000.000,00	148.842.825,00	(1.157.175,00)	
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Sosial	100.000.000,00	99.840.209,00	(159.791,00)	
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Lingkungan Hidup	205.000.000,00	125.500.000,00	(79.500.000,00)	
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Belanja Hibah kepada Organisasi	-	-	-	
Kemasyarakatan Bidang Pemerintahan	155.000.000,00	72.066.500,00	(82.933.500,00)	
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan	-	-	-	
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan	415.000.000,00	410.000.000,00	(5.000.000,00)	
Total	2.305.000.000,00	2.136.031.127,00	(168.968.873,00)	

- (4) Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar merupakan hibah untuk pelaksanaan Festival Gunung Slamet Tahun 2015 sebesar Rp100.000.000,00.
- (5) Realisasi Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp15.582.162.692,00, terdiri dari:

Tabel 5.30 Realisasi Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015

Penerima Hibah	Jumlah
Hibah kepada KPU Kabupaten	12.975.839.305,00
Hibah kepada Panwas Kabupaten	2.606.323.387,00
Total	15.582.162.692,00

(6) Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp11.926.574.870,00 atau hanya 40,03% dari realisasi Tahun 2014.

Belanja ini merupakan reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan Lampiran III.B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rincian Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga per SKPD pada Lampiran 1.



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

f) Belanja Bantuan Sosial_

Rp4.432.099.977,00

Belanja Bantuan Sosial yang terealisasi sebesar Rp4.432.099.977,00 atau 90,27% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2015 sebesar Rp4.910.000.000,00. Realisasi tersebut termasuk realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, yang merupakan reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2015 terdiri dari:

Tabel 5.31 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2015

Uraian	2015		2014
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Bansos kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.100.000.000,00	880.000.000,00	6.952.250.000,00
Belanja Bansos kepada Masyarakat	3.528.500.000,00	3.287.099.977,00	1.180.478.900,00
Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa	281.500.000,00	265.000.000,00	-
Total	4.910.000.000,00	4.432.099.977,00	8.132.728.900,00

(1) Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Realisasi Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2015 sebesar Rp880.000.000,00 mencapai 80,00% dari anggaran Rp1.100.000.000,00.

Tabel 5.32 Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Tahun 2015

Urajan	2015		2014
Oralan	Anggaran (Rp) Realisasi (R		Realisasi (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.100.000.000,00	880.000.000,00	6.952.250.000,00
Belanja Bantuan PAMSIMAS	1.100.000.000,00	880.000.000,00	1.010.000.000,00
Belanja Bantuan Pendampingan PNPM Belanja Bantuan Program	-	-	3.791.250.000,00
Stimulan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin			2.151.000.000,00

(2) Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat Tahun 2015 sebesar Rp3.287.099.977,00 atau hanya mencapai 93,16% dari anggaran sebesar Rp3.528.500.000,00.



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.33 Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat Tahun 2015

	20	2015	
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	3.528.500.000,00	3.287.099.977,00	1.180.478.900,00
Belanja Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Belanja Bantuan Beasiswa	823.500.000,00	725.200.000,00	-
SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu (Ban Gub)	200.000.000,00	200.000.000,00	694.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	931.500.000,00	800.199.977,00	341.478.900,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Anak Yatim Piatu	358.500.000,00	356.700.000,00	-
Belanja Bantuan Sosial Kepada Panti Asuhan/Werda	185.000.000,00	185.000.000,00	125.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada PPCI Belanja Bantuan Rehabilitasi	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin	1.010.000.000,00	1.000.000.000,00	-

(3) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp265.000.000,00 merupakan realisasi pekerjaan pematangan lahan permukiman relokasi korban bencana Dukuh Cikal Desa Jingkang Kecamatan Karangjambu yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

2) Belanja Modal

Rp170.645.780.046,00

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2015 sebesar Rp170.645.780.046,00 atau 73,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp233.091.225.000,00. Belanja Modal tersebut hanya sebesar 11,64% dari total Belanja Daerah Tahun 2015. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, realisasi 2015 di atas mengalami kenaikan sebesar Rp58.396.112.760,00 atau naik 52,02%.

Tabel 5.34 Realisasi Belanja Modal Tahun 2015

Uraian	2015		2014
Uraian	Anggaran (Rp)	garan (Rp) Realisasi (Rp)	
BM Tanah	31.697.167.000,00	5.179.573.602,00	7.152.074.703,00
BM Peralatan dan Mesin	59.420.774.000,00	41.165.069.809,00	32.536.700.768,00
BM Gedung dan Bangunan	66.653.304.000,00	58.386.338.010,00	31.292.893.150,00
BM Jalan, Irigasi, dan Jaringan	74.551.704.000,00	65.402.198.125,00	39.009.750.850,00
BM Aset Tetap Lainnya	768.276.000,00	512.600.500,00	2.258.247.815,00
Total	233.091.225.000,00	170.645.780.046,00	112.249.667.286,00



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Dari total Belanja Modal di atas, tidak seluruhnya menjadi Aset Tetap akan tetapi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp373.211.280,00 tidak menghasilkan asset tetap karena nilainya di bawah satuan minimum kapitalisasi (capitalization threshold).

a) Belanja Modal Tanah

Rp5.179.573.602,00

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp5.179.573.602,00 atau 16,34% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2015 sebesar Rp31.697.167.000,00 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.35 Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2015

Uraian	2015		Selisih Lebih /
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Kurang)
Belanja Modal Tanah	31.697.167.000,00	5.179.573.602,00	(26.517.593.398,00)
BM Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	11.347.167.000,00	5.179.573.602,00	(6.167.593.398,00)
BM Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	20.350.000.000,00	0,00	(20.350.000.000,00)

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp41.165.069.809,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp41.165.069.809,00 atau 69,28% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2015 sebesar Rp59.421.924.000,00.



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.36 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2015

	2015		Selisih Lebih /	
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Kurang)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.421.924.000,00	41.165.069.809,00	(18.256.854.191,00)	
BM Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	803.149.000,00	764.390.000,00	(38.759.000,00)	
BM Pengadaan Alat-alat Bantu	3.930.444.000,00	217.396.775,00	(3.713.047.225,00)	
BM Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	14.696.483.000,00	14.404.138.400,00	(292.344.600,00)	
BM Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	397.700.000,00	397.540.000,00	(160.000,00)	
BM Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	39.000.000,00	39.000.000,00	-	
BM Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	1.519.665.000,00	1.503.995.900,00	(15.669.100,00)	
BM Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	25.100.000,00	20.440.000,00	(4.660.000,00)	
BM Pengadaan Alat Ukur	209.371.000,00	201.540.400,00	(7.830.600,00)	
BM Pengadaan Alat Pengolahan	235.660.000,00	228.406.000,00	(7.254.000,00)	
BM Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	155.600.000,00	150.976.000,00	(4.624.000,00)	
BM Pengadaan Alat Kantor	2.413.893.000,00	2.287.161.600,00	(126.731.400,00)	
BM Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.005.171.000,00	3.837.625.581,00	(167.545.419,00)	
BM Pengadaan Komputer	3.756.939.000,00	3.367.722.556,00	(389.216.444,00)	
BM Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	81.224.000,00	77.774.000,00	(3.450.000,00)	
BM Pengadaan Alat Studio	998.854.000,00	972.102.701,00	(26.751.299,00)	
BM Pengadaan Alat Komunikasi	434.280.000,00	422.803.000,00	(11.477.000,00)	
BM Pengadaan Peralatan Pemancar	184.450.000,00	183.165.000,00	(1.285.000,00)	
BM Pengadaan Alat Kedokteran	6.293.385.000,00	3.997.760.192,00	(2.295.624.808,00)	
BM Pengadaan Alat Kesehatan	74.900.000,00	9.300.090,00	(65.599.910,00)	
BM Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	2.292.343.000,00	1.771.642.823,00	(520.700.177,00)	
BM Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	9.178.358.000,00	769.142.000,00	(8.409.216.000,00)	
BM Pengadaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	
BM Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	25.635.000,00	25.575.000,00	(60.000,00)	
BM Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	60.400.000,00	58.185.000,00	(2.215.000,00)	
BM Peralatan dan Mesin - Dana BLUD	7.595.920.000,00	5.457.286.791,00	(2.138.633.209,00)	

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan _______Rp58.386.338.010,00 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp58.386.338.010,00 atau 87,60% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2015 sebesar Rp66.653.304.000,00, terdiri dari:

POT

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.37 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2015

Uraian	2015		Selisih Lebih / (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.653.304.000,00	58.386.338.010,00	(8.266.965.990,00)
Belanja Modal Gedung dan			
Bangunan - Pengadaan Bangunan	59.013.318.000,00	53.404.407.810,00	(5.608.910.190,00)
Gedung Tempat Kerja			
Belanja Modal Gedung dan			
Bangunan - Pengadaan Bangunan	141.000.000,00	140.900.000,00	(100.000,00)
Tugu Peringatan			
Belanja Modal Gedung dan			
Bangunan - Pengadaan Bangunan	541.645.000,00	520.477.200,00	(21.167.800,00)
Rambu-Rambu			
Belanja Modal Gedung dan	6.957.341.000.00	4.320.553.000.00	(2.636.788.000,00)
Bangunan - Dana BLUD		1.020.000.000,00	(2.000.700.000,00)

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan ______Rp65.402.198.125,00 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp65.402.198.125,00 atau 87,73% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp74.551.704.000,00, terdiri dari:

Tabel 5.38 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2015

	2015		2015 Selisih Lebih /	
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Kurang)	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.551.704.000,00	65.402.198.125,00	(9.149.505.875,00)	
BM Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan BM Jalan, Irigasi dan Jaringan -	40.988.081.000,00	36.205.269.750,00	(4.782.811.250,00)	
Pengadaan Jembatan	27.729.345.000,00	26.087.426.150,00	(1.641.918.850,00)	
BM Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi BM Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman	270.000.000,00	267.129.975,00	(2.870.025,00)	
Sungai dan Penanggulangan BA	17.500.000,00	17.500.000,00	-	
BM Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	5.000.000,00	3.394.800,00	(1.605.200,00)	
BM Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor BM Jalan, Irigasi dan Jaringan -	259.308.000,00	244.052.000,00	(15.256.000,00)	
Pengadaan Bangunan Air	354.590.000,00	37.868.000,00	(316.722.000,00)	
BM Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih BM Jalan, Irigasi dan Jaringan -	15.775.000,00	10.501.500,00	(5.273.500,00)	
Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	2.311.235.000,00	7.140.000,00	(2.304.095.000,00)	
BM Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan	13.400.000,00	13.400.000,00	-	
BM Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	
BM Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	2.585.270.000,00	2.508.515.950,00	(76.754.050,00)	

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya _______ Rp512.600.500,00 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp512.600.500,00 atau 66,82% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp767.126.000,00.



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.39 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2015

	2015		Selisih Lebih /	
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Kurang)	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	767.126.000,00	512.600.500,00	(305.675.500,00)	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	525.000.000,00	297.882.000,00	(278.268.000,00)	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	101.370.000,00	95.737.500,00	(5.632.500,00)	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	32.269.000,00	31.716.000,00	(553.000,00)	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	6.200.000,00	6.109.000,00	(91.000,00)	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	82.287.000,00	81.156.000,00	(1.131.000,00)	

3) Belanja Tidak Terduga

Rp0,00

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja ini dikelola secara sentralistik oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Pada Tahun 2015, tidak ada realisasi Belanja Tidak Terduga.

c. TRANSFER_

Rp167.988.791.740,00

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2015 Sebesar Rp167.988.791.740,00 atau naik Sebesar 224,11% dari realisasi Tahun 2014 Sebesar Rp51.830.470.510,00. Realisasi Transfer Terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp4.467.762.000,00 dan Transfer Bantuan Keuangan Rp163.521.029.740,00.

1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan

_Rp4.467.762.000,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2015 sebesar Rp4.467.762.000,00, terdiri dari:

Tabel 5.40 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2015

Union	2015		
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	4.467.762.000,00	4.467.762.000,00	
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.274.612.000,00	3.274.612.000,00	
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	3.274.612.000,00	3.274.612.000,00	
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.193.150.000,00	1.193.150.000,00	
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	1.193.150.000,00	1.193.150.000,00	

2) Transfer Bantuan Keuangan

_Rp163.521.029.740,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2015 terdiri dari transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya, Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tahun 2015 sebesar Rp163.521.029.740,00 atau 99,74% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2015 sebesar Rp163.953.126.000,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp113.022.655.490,00 atau naik 121,92%. Porsi terbesar dari Transfer adalah untuk Bantuan Keuangan kepada Desa yang mencapai 99,41%.

Tabel 5.41 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2015

Harian	2015		
Oraian	Uraian — Anggaran (Rp) F		
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	163.953.126.000,00	163.521.029.740,00	
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000,00	0,00	
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	162.953.126.000,00	162.807.688.240,00	
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	900.000.000,00	713.341.500,00	

- a) **Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya**______0,00 Tidak ada realisasi transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya Tahun 2015.
- b) **Transfer Bantuan Keuangan ke Desa______Rp162.807.688.240,00**Realisasi Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar Rp162.807.688.240,00 atau 99,91% dari anggaran Rp162.953.126.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.42 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun 2015

Harian	2015		
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	162.953.126.000,00	162.807.688.240,00	
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	83.737.153.000,00	83.737.153.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan PAMSIMAS	104.000.000,00	99.500.000,00	
Belanja Bantuan Sarpras Sanitasi Masyarakat	11.995.000.000,00	11.885.000.000,00	
Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (Ban Gub)	150.000.000,00	150.000.000,00	
Dana Desa	66.606.973.000,00	66.606.973.000,00	
Bantuan Keuangan Pembangunan Jalan Dukuh Mlayang Desa Sidareja	360.000.000,00	329.062.240,00	

c) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya______Rp713.341.500,00

Realisasi Bantuan Keuangan Lainnya terdiri dari Tranfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Sebesar Rp713.341.500,00 dari Anggaran Sebesar Rp900.000.000,00.

Belanja Bantuan Keuangan merupakan bantuan kepada Partai Politik yang mempunyai wakil di DPRD Kabupaten Purbalingga. Untuk Tahun 2015 realisasi bantuan dimaksud sebesar Rp713.341.500,00 atau 79,26% dari anggaran yang ditetapkan.

Rincian alokasi dan realisasi Transfer Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2015 sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.43 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2015

Ht	2015		2014
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	900.000.000,00	713.341.500,00	900.000.000,00
Partai Nasdem	40.332.000,00	40.332.000,00	13.444.000,00
Partai Kebangkitan Bangsa	102.034.000,00	102.034.000,00	89.252.150,00
Partai Keadilan Sejahtera	69.810.500,00	69.810.500,00	77.854.650,00
PDI Perjuangan	215.987.000,00	215.987.000,00	259.984.850,00
Partai Golkar	135.276.000,00	0,00	145.880.650,00
Partai Gerindra	124.426.000,00	124.426.000,00	41.475.500,00
Partai Demokrat	59.987.000,00	59.987.000,00	105.200.850,00
Partai Amanat Nasional	60.978.000,00	60.978.000,00	77.312.000,00
Partai Persatuan Pembangunan	51.382.500,00	0,00	48.716.150,00
Partai Hanura	39.787.000,00	39.787.000,00	13.262.500,00
Partai Demokrasi Pembaruan	0,00	0,00	18.943.350,00
Partai Matahari Bangsa	0,00	0,00	8.673.350,00

d. PEMBIAYAAN

_Rp162.982.705.658,00

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Total Pembiayaan Daerah (*netto*) Tahun 2015 sebesar Rp162.982.705.658,00 atau mencapai 100,12% dari target sebesar Rp162.787.887.000,00.

Realisasi pembiayaan daerah (*netto*) dihasilkan dari realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp198.133.252.846,00 dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp35.150.547.188,00.

Tabel 5.44 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2015

	201	2014	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	196.791.609.000,00	198.133.252.846,00	133.173.166.611,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	34.003.722.000,00	35.150.547.188,00	37.671.720.746,00
Pembiayaan Netto	162.787.887.000,00	162.982.705.658,00	95.501.445.865,00

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp198.133.252.846,00 Pembiayaan Tahun sebesar Realisasi Penerimaan Daerah 2015 Rp198.133.252.846,00 atau 100,68% dari sebesar anggaran Rp196.791.609.000,00, yang terdiri dari:



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.45 Realisasi Penerimaaan Pembiayaan Tahun 2015

	20	115	2014
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Penggunaan SILPA	169.283.609.000,00	169.283.609.641,00	132.878.401.876,00
Pelampauan Penerimaan PAD	34.063.793.000,00	34.063.793.641,00	10.560.499.938,00
Pelampauan Penerimaan Dana			
Perimbangan	3.470.911.000,00	3.470.911.000,00	-
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	8.408.479.000,00
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	118.484.870.000,00	118.484.870.000,00	68.769.231.299,00
Kegiatan Lanjutan	12.807.759.000,00	12.807.759.000,00	45.019.428.000,00
Pelampauan Pembiayaan Netto	456.276.000,00	456.276.000,00	120.763.639,00
Pencairan Dana Cadangan	27.508.000.000,00	28.694.671.367,00	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	154.971.838,00	294.764.735,00
Jumlah	196.791.609.000,00	198.133.252.846,00	133.173.166.611,00

- a) Penggunaan SILPA sebesar Rp169.283.609.641,00 merupakan SILPA Tahun 2014 yang dialokasikan untuk pembiayaan Tahun 2015.
- b) Pencairan Dana Cadangan Sebesar Rp28.694.671.367,00 terdiri dari:

Tabel 5.46 Realisasi Pencairan Dana Cadangan Tahun 2015

Uraian	Jumlah
Pencairan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah	10.380.489.721,00
Pencairan Dana Cadangan Pembangunan Jembatan Gatot Subroto	7.829.682.096,00
Pencairan Dana Cadangan Irigasi	10.484.499.550,00
Total	28.694.671.367,00

c) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp154.941.838,00 merupakan penerimaan kembali atas dana bergulir berupa pemberian pinjaman maupun investasi yang dikelola oleh SKPD terdiri dari:

Tabel 5.47 Realisasi Penerimaan Kembali atas Dana Bergulir Tahun 2015

No	Uraian		Jumlah
1	Bantuan Modal Rumah Tangga Kecil 2001 (IRTK)		36.871.838,00
2	Dana Stimulan dan Pinjaman PKL		350.000,00
3	Investasi Usaha Peternakan 2003		16.300.000,00
4	Pengembangan Usaha Bidang Peternakan 2004		200.000,00
5	Pengembangan Usaha Bidang Peternakan 2006		5.200.000,00
6	Kegiatan DAK Peternakan Tahun 2006 (DINNAKAN)		2.000.000,00
7	Kegiatan DAK Peternakan Tahun 2007 (DINNAKAN)		30.000.000,00
8	Kegiatan DAK Peternakan Tahun 2008(DINNAKAN)		64.050.000,00
		Total	154.971.838,00

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp35.150.547.188,00 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp35.150.547.188,00 atau 103,37% dari target dalam APBD-P Tahun 2015 sebesar Rp34.003.722.000,00 terdiri dari:



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.48 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2015

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Jumlah

20	15	2014
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
15.000.000.000,00	16.146.826.442,00	27.508.000.000,00-
18.940.000.000,00	18.940.000.000,00	10.100.000.000,00
63.722.000,00	63.720.746,00	63.720.746,00
34.003.722.000,00	35.150.547.188,00	37.671.720.746,00

- a) Pembentukan Dana Cadangan sebesar 16.146.826.442,00 terdiri dari:
 - (1) Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Bandara Purbalingga sebesar Rp15.000.000.000,000
 - (2) Pembentukan Dana Cadangan yang berasal dari jasa giro dana cadangan bulan Januari sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp1.146.826.442,00.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Pembangunan Bandar Udara Wirasaba, hasil pengelolaan dana cadangan diakumulasikan sebagai penambah nilai dana cadangan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Dana Cadangan bisa dilihat pada penjelasan poin 5.b.1.d.

b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terdiri dari:

Tabel 5.49 Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2015

	Realisasi 2015 (Rp)
PD BPR BKK Purbalingga	2.242.000.000,00
PD BPR Artha Perwira Purbalingga	1.450.000.000,00
PT BPRS Buana Mitra Perwira	470.000.000,00
PD BPR BKK Karangmoncol	50.000.000,00
PD Purbalingga Ventura	250.000.000,00
PD Owabong	2.500.000.000,00
PDAM	7.288.000.000,00
PT BPD Jawa Tengah	4.690.000.000,00
Jumlah	18.940.000.000,00

c) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Sebesar Rp63.720.746,00 merupakan pembayaran pokok atas Penerusan Pinjaman atas Eks Loan Agreement ADB / IBRD No. 1198-INO. Penjelasan lebih rinci mengenai Utang Dalam Negeri dapat dilihat pada penjelasan poin 5.b.2.b.1.

e.	SISA	LEBIH	PEMBIAYAAN	ANGGARAN
	(SILPA)			_Rp264.427.219.476,00

Dengan adanya surplus anggaran sebesar Rp101.444.513.818,00 dan Pembiayaan netto sebesar Rp162.982.705.658,00, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2015 sebesar Rp264.427.219.476,00.



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Dari total SiLPA sebesar Rp264.427.219.476,00, sebesar Rp123.849.744.215,00 merupakan SiLPA yang telah jelas penggunaannya (SiLPA terikat) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.50 Rincian SiLPA Terikat Tahun 2015

No	Keterangan	Jumlah	
1.	SiLPA 2015		264.427.219.476,00
2	Silpa Terikat:		
a.	Sisa DAK	21.834.284.450,00	
b.	Sisa Tunjangan Sertifikasi dan Tamsil Guru	64.431.287.235,00	
C.	Sisa Kas JKN	7.095.678.207,00	
d.	Sisa Kas BLUD	1.703.088.698,00	
e.	Investasi Jangka Pendek (Deposito BLUD)	20.000.000.000,00	
f.	Retensi (Jaminan Pihak Ketiga)	8.629.179.535,00	
g.	Utang Pajak	451.090,00	
h.	Dana Jamkesda	155.775.000,00	
3.	Jumlah SiLPA Terikat		123.849.744.215,00
4.	SiLPA Murni (1-3)		140.577.475.261,00

2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

a. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2014 sebesar Rp169.283.609.641,00 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014. Jumlah SAL tersebut telah direalisasikan sebagai penggunaan SILPA TA 2015.

b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2015

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Dengan adanya surplus anggaran sebesar Rp101.444.513.698,00 dan Pembiayaan Netto sebesar Rp162.982.705.658,00, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2015 sebesar Rp264.427.219.476,00.

SiLPA tersebut berasal dari:

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.51 Realisasi SiLPA Tahun 2015

Uraian	Jumlah
Pelampauan Pendapatan Daerah	14.584.938.546,00
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya:	249.647.462.272,00
Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	99.047.231.761,00
Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	4.310.957.435,00
Belanja Barang dan Jasa	73.649.251.227,00
Belanja Modal	62.445.444.954,00
Belanja Bunga	15.183.431,00
Belanja Hibah	7.285.897.181,00
Belanja Bantuan Sosial	461.400.023,00
Belanja Bantuan Keuangan	432.096.260,00
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
Pelampauan Pembiayaan Netto	194.818.658,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	264.427.219.476,00

c. Saldo Anggaran Lebih Akhir (SAL) Akhir

Karena tidak ada transaksi koreksi yang melibatkan akun perubahan SAL, maka posisi SAL per 31 Desember 2015 sama dengan SiLPA Tahun 2015 sebesar Rp264.427.219.476,00, terdiri atas:

Tabel 5.52 Realisasi SiLPA Tahun 2015

Uraian	31-Des-2015
Kas di Kas Daerah	244.479.107.397,00
Kas di Bendahara Penerimaan	196.005.743,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	34.065.666,00
Kas di BLUD	1.703.088.698,00
Kas di Bendahara JKN	7.095.678.207,00
Investasi Jangka Pendek BLUD	20.000.000.000,00
(-) Utang PFK	8.785.403.635,00
(-) Utang Retensi BLUD	295.322.600,00
Jumlah	264.427.219.476,00

3. PENJELASAN POS-POS NERACA

a. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Secara ringkas, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.53 posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2015

	2013	2014	2015
Aset Lancar	170.167.703.341,00	209.662.550.302,67	316.057.388.355,94
Investasi Jangka Panjang	127.205.180.699,00	141.690.513.553,00	163.028.336.334,53
Aset Tetap	1.735.062.051.934,00	1.834.133.015.972,00	2.136.067.896.521,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	(616.185.957.768,59)	(711.488.932.749,37)
Dana Cadangan	-	27.508.000.000,00	15.082.297.878,00
Aset Lainnya	90.468.501.535,00	19.591.157.488,00	28.687.700.989,00
Jumlah Aset	2.122.903.437.509,00	1.616.399.279.547,08	1.947.434.687.329,10
Kewajiban Jangka Pendek	7.376.679.036,00	19.680.381.450,00	16.372.395.325,51
Kewajiban Jangka Panjang	7.126.167.759,00	6.568.861.846,00	6.051.007.483,00
Jumlah Kewajiban	14.502.846.795,00	26.249.243.296,00	22.423.402.808,51
Ekuitas	2.108.400.590.714,00	1.590.150.036.251,08	1.925.011.284.520,59
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.122.903.437.509,00	1.616.399.279.547,08	1.947.434.687.329,10

b. PENJELASAN POS-POS NERACA

1) Penjelasan atas Penyajian Kembali (Restatement) Neraca Tahun 2014

Sesuai dengan Pasal 9 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Pemerintah Daerah menyajikan kembali LRA, Neraca dan LAK tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapan SAP berbasis akrual.

Kebijakan penyajian kembali laporan keuangan (*restatement*) Tahun 2014 juga diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2015.

Pada bulan Januari 2016, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) kemudian menerbitkan Interpretasi PSAP Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, yang salah satu interpretasinya adalah bahwa *entitas tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju Akrual menjadi Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Akrual*.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagaimana telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi, memilih untuk tetap melakukan restatement terhadap Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju Akrual khususnya Neraca sehingga Neraca Tahun 2014 dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan terutama karakteristik "dapat dibandingkan".

Akun-akun yang dilakukan restatement antara lain:

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.54 Uraian Restatement Akun-akun Neraca Sebagai Saldo Awal Tahun 2015

	2014 (audited)	2014 (restated)	
Piutang	Disajikan sebagai rekening Piutang	Sebagian disajikan sebagai rekening Piutang Pendapatan dan sebagian yang berupa Beban Dibayar Dimuka disajikan sebagai Beban Dibayar Dimuka	
Dana Bergulir	Disajikan sebagai Aset Lain-Lain – Dana Bergulir	Disajikan sebagai Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen	
Beban Dibayar Dimuka		Digunakan untuk menyajikan sebagian nilai Piutang dan tambahan Beban Dibayar Dimuka yang baru disajikan dalam Neraca (<i>restated</i>)	
Akumulasi Penyusutan	***	Sudah mengadopsi kebijakar penyusutan asset tetap	
Pendapatan Diterima Dimuka		Digunakan untuk menyajikan Pendapatan Diterima Dimuka	

a) Beban Dibayar Dimuka

Merupakan Premi Asuransi Barang Milik Daerah (Kendaraan) yang dibayar dimuka terdapat pada DPPKAD dan RSUD Goeteng Taroenadibrata, Premi Asuransi Tanggung Gugat pada RSUD Goeteng Taroenadibrata dan RSKBD Panti Nugroho, serta Premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD. Pada LK SKPD Tahun 2014 (*audited*) Beban Dibayar di Muka pada DPPKAD dan Sekretariat DPRD disajikan pada akun Piutang Lain-Lain. Sedangkan Beban Dibayar Dimuka pada RSUD Goeteng Taroenadibrata dan RSKBD Panti Nugroho baru disajikan pada Neraca 2014 (*restated*).

Tabel 5.55 Nilai Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2014

No	SKPD	Nilai
1	DPPKAD	87.755.840,00
2	Sekretariat DPRD	322.347.946,00
3	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	21.488.325,00
4	RSKBD Panti Nugroho	6.276.666,67
	Total	437.868.677,67

b) Dana Bergulir

Merupakan reklasifikasi dari Aset Lain-Lain — Dana Bergulir karena sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 7, Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

c) Akumulasi Penyusutan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mengadopsi kebijakan akumulasi penyusutan aset tetap.



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

d) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai Utang PFK dalam Neraca 2014 (*restated*) mengalami penurunan sebesar Rp25.026.000,00 karena Utang Retensi BLUD direklasifikasi ke kelompok Utang Jangka Pendek Lainnya.

e) Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka berasal dari reklasifikasi Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdapat pada DPPKAD sebesar Rp5.008.219,00 yang berasal dari pendapatan sewa Tahun 2015 yang telah diterima pembayarannya di Tahun 2014. Selain itu, terdapat tambahan Pendapatan Diterima Dimuka pada RSUD yang belum disajikan dalam Neraca 2014 (*audited*) sebesar Rp3.205.625,00.

Tabel 5.56 Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2014

No	SKPD	Nilai
1	DPPKAD	5.008.219,00
2	RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata (restatement)	3.205.625,00
	Total	8.213.844,00

f) Utang Belanja

Merupakan Utang Belanja Pegawai yang terdapat pada semua SKPD, berupa kekurangan pembayaran gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya Tahun 2014 yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2014.

Selain itu juga berasal dari reklasifikasi Utang Belanja Barang dan Jasa pada RSKBD Panti Nugroho atas pembelian obat Tahun 2014 sebesar Rp45.467.298,00 yang pada Neraca 2014 (*audited*) disajikan pada akun Utang Jangka Pendek Lainnya.

g) Utang Jangka Pendek Lainnya

Merupakan porsi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2015 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi atas sewa kios Pasar Segamas dan Utang Retensi BLUD yang dalam Neraca 2014 (*audited*) disajikan pada akun Utang PFK.

Tabel 5.57 Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2014 (Restatement)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	484.080.599,00
2	RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata (restatement)	25.026.000,00
	Total	509.106.599,00

2) **ASET**

Rp1.947.434.687.329,10

Posisi Aset Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.947.434.687.329,10, mengalami peningkatan sebesar Rp331.035.407.782,02 atau 20,48% dari posisi per 31 Desember 2014 (*restated*).

Rincian Aset tersebut terdiri dari:



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.58 Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2014 (Restatment)

	31-Des-15	31-Des-14 (restated)	%
Aset Lancar	316.057.388.355,94	209.662.550.302,67	150,75
Investasi Jangka Panjang	163.028.336.334,53	138.472.009.808,00	117,73
Aset Tetap	2.136.067.896.521,00	1.834.133.015.972,00	116,46
Akumulasi Penyusutan	(711.488.932.749,37)	(616.185.957.768,59)	115,47
Dana Cadangan	15.082.297.878,00	27.508.000.000,00	54,83
Aset Lainnya	28.687.700.989,00	22.809.661.233,00	125,77
Jumlah	1.947.434.687.329,10	1.616.399.279.547,08	120,48

a) Aset Lancar____

_Rp316.057.388.355,94

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2015 sebesar Rp316.057.388.355,94, mengalami peningkatan sebesar Rp106.394.838.053,27 atau naik 50,75% dari saldo Aset Lancar per 31 Desember 2014 (*restated*). Jumlah Aset Lancar tersebut terdiri dari:

Tabel 5.59 Daftar Aset Lancar Per 31 Desember 2015

	31-Des-15	31-Des-14 (restated)	%
Kas	259.242.058.969,00	156.925.539.432,00	165,20
Investasi Jangka Pendek	20.000.000.000,00	23.300.000.000,00	-
Piutang Pendapatan	17.569.435.211,00	8.288.612.460,00	211,97
Penyisihan Piutang	(691.718.049,00)	(1.194.342.953,00)	57,92
Beban Dibayar Dimuka	482.312.215,50	434.868.677,67	110,91
Persediaan	19.455.300.009,44	21.904.872.686,00	88,82
Total	316.057.388.355,94	209.659.550.302,67	150,75

(1) Kas

_Rp259.242.058.969,00

Saldo Kas per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp259.242.058.969,00, terdiri dari:

Tabel 5.60 Daftar Aset Lancar Per 31 Desember 2015

	31-Des-2015	31-Des-2014	%
Kas di Kas Daerah	244.479.107.397,00	148.325.489.985,00	164,83
Kas di Bendahara Penerimaan	196.005.743,00	913.729.871,00	21,45
Kas di Bendahara Pengeluaran	34.065.666,00	47.777.818,00	71,30
Kas di BLUD	1.703.088.698,00	3.988.554.425,00	42,70
Kas di Bendahara JKN	7.095.678.207,00	3.649.987.333,00	194,40
Kas Lainnya	5.734.113.258,00	-	-
Jumlah	259.242.058.969,00	156.925.539.432,00	165,20

(a) Kas di Kas Daerah

_Rp244.479.107.397,00

Jumlah Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2015 sebesar Rp244.479.107.397,00, terdiri dari:



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.61 Daftar Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2015

	31-Des-15	31-Des-14	%
Rekening Bank Jateng Purbalingga (1-027-00000-1)	89.479.107.397,00	118.825.489.985,00	475,31
Deposito di BPD Jateng	133.000.000.000,00	-	
Deposito di BRI	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	66,67
Deposito di BNI	-	10.000.000.000,00	-
Deposito di BTN	12.000.000.000,00	2.000.000.000,00	600,00
Deposito di Bank Mandiri	-	2.500.000.000,00	-
Jumlah	244.479.107.397,00	148.325.489.985,00	505,90

Jika mengacu kepada rekening koran BPD Jawa Tengah Nomor 1-027-00000-1 per tanggal 31 Desember 2015, nilai Kas di Kas Daerah sebesar Rp89.477.316.993,00 atau terdapat perbedaan sebesar Rp1.790.404,00. Perbedaan tersebut terjadi karena BPD melakukan pendebetan sebanyak 2 kali terhadap potongan pajak SP2D-15440/LS tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp1.935.859,00 dan kurang pendebetan sebesar Rp145.455,00 pada SP2D-15561/LS tanggal 30 Desember 2015.

Terhadap kekeliruan tersebut, BPD Jawa Tengah telah melakukan koreksi pada tanggal 13 dan 14 Januari 2016 sesuai surat Nomor 0104/DT.02.01/027/2016 dan 0109/DT.02.01/027/2016.

Deposito pada BPD Jateng, BRI dan BTN merupakan deposito dengan umur satu bulan sehingga sangat likuid dan dapat dikategorikan sebagai Kas.

(b) Kas di Bendahara Penerimaan______Rp196.005.743,00

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp196.005.743,00 merupakan saldo kas yang berasal dari Pendapatan SKPD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 belum disetorkan ke RKUD sebesar Rp161.981.604,00 dan kas di Bendahara Penerimaan BLUD yang sampai tanggal 31 Desember 2015 belum disetorkan ke Rekening Kas BLUD sebesar Rp34.024.139,00, sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.62 Daftar Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2015

-	31-Des-15	31-Des-14	%
Dinas Kesehatan	-	822.477.050,00	-
UPTD Puskesmas Purbalingga	4.795.000,00	-	-
UPTD Puskesmas Bojong	596.000,00	1.670.000,00	35,69
UPTD Puskesmas Kutasari	4.500.000,00	-	-
UPTD Puskesmas Kemangkon	-	60.000,00	-
UPTD Puskesmas Pengadegan	2.435.000,00	-	-
UPTD Puskesmas Bukateja	5.995.000,00	-	-
UPTD Puskesmas Rembang	11.365.000,00	280.000,00	4.058,93
UPTD Puskesmas Karanganyar	21.840.000,00	-	-
UPTD Puskesmas Karangmoncol	49.245.000,00	-	-
UPTD Puskesmas Bobotsari	775.000,00	-	-
UPTD Puskesmas Serayu Larangan	7.750.000,00	-	-
UPTD Puskesmas Karangreja	3.908.004,00	-	-
UPTD Puskesmas Karangjambu	12.240.000,00	-	-
UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten	3.040.000,00	2.368.000,00	128,38
RSUD Goeteng Taroenadibrata	34.024.139,00	58.383.621,00	58,28
RSKBD Panti Nugroho	33.497.600,00	27.675.700,00	121,04
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	-	815.500,00	-
Total _	196.005.743,00	913.729.871,00	21,45

- ✓ Saldo Kas di Bendahara Penerimaaan pada Puskesmas dan RSKBD Panti Nugroho telah disetor seluruhnya ke Kas Daerah di bulan Januari 2016.
- ✓ Sedangkan saldo Kas di Bendahara Penerimaan RSUD Goeteng Taroenadibrata juga telah disetor ke rekening BLUD pada bulan Januari 2016.
- (c) Kas di Bendahara Pengeluaran Rp34.065.666,00 Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas tunai pada Bendahara Pengeluaran SKPD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 belum disetor ke rekening Kas Daerah, terdiri dari:



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.63 Daftar Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran per SKPD Per 31 Desember 2015

	31-Des-15	31-Des-14	
Dinas Pendidikan	2.035.405,00	445.652,00	456,73
UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karangreja	8.283.381,00	0,00	-
UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padamara	471.486,00	0,00	-
UPT SMA Negeri 1 Kejobong	0,00	3.930.758,00	-
UPT SMP Negeri 3 Purbalingga	0,00	186.800,00	-
UPT SMP Negeri 4 Purbalingga	214.980,00	0,00	-
UPT SMP Negeri 2 Kutasari	4.000.000,00	0,00	-
UPT SMP Negeri 2 Kemangkon	504.000,00	0,00	-
UPT SMP Negeri 1 Karangmoncol	5.422.260,00	0,00	-
UPT SMP Negeri 1 Bobotsari	1.000.000,00	0,00	-
UPT SMK Negeri 1 Kaligondang	2.447.000,00	0,00	-
UPT SMP Negeri 3 Kutasari	0,00	13.000,00	-
UPT SMP Negeri 4 Rembang	0,00	1.450.000,00	-
UPT SMK Negeri 1 Bojongsari	0,00	2.245.000,00	-
UPT SMK Negeri 3 Purbalingga	501.049,00	0,00	-
UPT SMK Negeri 1 Rembang	30.000,00	0,00	-
Dinas Kesehatan	2.320.928,00	2.320.928,00	100,00
UPTD Puskesmas Bojongsari	42.081,00	0,00	-
UPTD Puskesmas Padamara	0,00	192.900,00	-
UPTD Puskesmas Bukateja	0,00	9.942.709,00	-
UPTD Puskesmas Karanganyar	0,00	2.000,00	-
Dinhubkominfo	5.866.000,00	0,00	-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	4.825.000,00	-
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	2.214.500,00	-
Sekretariat Daerah	0,00	19.585.000,00	-
Kecamatan Rembang	5.050,00	0,00	-
Kecamatan Kertanegara	0,00	238.000,00	-
Kelurahan Bojong	451.090,00	34.420,00	1.310,55
Kelurahan Purbalingga Lor	0,00	663,00	-
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	370.956,00	486,00	76.328,40
Dinbudparpora	100.000,00	150.000,00	66,67
Total	34.065.666,00	47.777.816,00	71,30

✓ Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut terdiri dari:

Tabel 5.64 Daftar Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran per Jenis Kas Per 31 Desember 2015

SKPD
28,00 DKK
78,00 14 SKPD
70,00 5 SKPD
90,00 Kel. Bojong
66,00



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

- ✓ Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.320.928,00 merupakan sisa Uang Persediaan (UP) tahun 2010 pada Dinas Kesehatan yang tidak dapat disetor kembali ke Kas Daerah karena hilang/dicuri dari brankas.
- ✓ Sedangkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada SKPD lain merupakan sisa UP dan TUP Tahun 2015 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 belum disetor ke Kas Daerah, kecuali saldo kas pada Kelurahan Bojong sebesar Rp451.090,00 yang merupakan potongan pajak yang sampai tanggal 31 Desember 2015 belum disetor ke rekening Kas Negara.

(d) Kas di BLUD Rp1.703.088.698,00

Saldo Kas di BLUD sebesar Rp1.703.088.698,00 terdiri dari pendapatan BLUD baik yang berasal dari pendapatan jasa pelayanan maupun pendapatan lainnya yang sampai dengan 31 Desember 2015 belum dibelanjakan sebesar Rp1.407.766.198,00 dan saldo dana retensi Rp295.322.500,00.

Tabel 5.65 Sisa Kas di BLUD per 31 Desember 2015

	31-Des-15	31-Des-14	%
Kas di BLUD	1.703.088.698,00	3.988.554.425,00	42,70
Jumlah	1.703.088.698,00	3.988.554.425,00	42,70

(e) Kas di Bendahara JKN Rp7.095.678.207,00

Saldo Kas di Bendahara JKN sebesar Rp7.095.678.207,00 merupakan jumlah dana kapitasi JKN yang sampai dengan 31 Desember 2015 belum digunakan. Jumlah tersebut merupakan selisih dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN dengan total belanja JKN Tahun 2015 pada 22 FKTP (Puskesmas) di Kabupaten Purbalingga ditambah dengan saldo awal Kas di Bendahara JKN.

Tabel 5.66 Sisa Kas di Bendahara JKN per 31 Desember 2015

Kas di Bendahara JKN Sisa Belanja JKN pada Pusk Kemangkon **Jumlah**

Saldo Awal 2015	Pendapatan 2015	Belanja 2015	Saldo Akhir 2015
3.649.987.333,00	37.141.230.500,00	3.695.539.746,00	7.095.678.087,00
	120,00		120,00
3.649.987.333,00	37.141.230.620,00	3.695.539.746,00	7.095.678.207,00

Rincian mutasi Kas di Bendahara JKN per FKTP pada Lampiran 2.

Saldo Kas Lainnya Rp5.734.113.258,00 Saldo Kas Lainnya sebesar Rp5.734.113.258,00 merupakan sisa Dana BOS yang sampai dengan 31 Desember 2015 masih belum dibelanjakan oleh sekolah-sekolah negeri penerima dana BOS. Jumlah tersebut berasal dari perhitungan: Saldo awal dana BOS 1



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Januari 2015 (+) Total penerimaan dana BOS Tahun 2015 (-) Total belanja BOS Tahun 2015 (+) Pendapatan bunga bank Tahun 2015.

Tabel 5.67 Daftar Sisa Kas Dana BOS per 31 Desember 2015

No	Penerima BOS	Saldo Awal 01-01-2015	Penerimaan BOS	Bunga Bank	Penggunaan BOS	Saldo Akhir 31-12-2105
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(2+4+5-6)
1	SD Negeri	447.148.059,00	59.944.200.000,00	71.681.773,00	59.462.318.382,00	1.000.711.450,00
2	SMP Negeri	2.497.728.672,00	31.224.750.000,00	91.602.770,00	30.042.603.287,00	3.771.478.155,00
3	SMA Negeri	16.278.700,00	8.048.400.040,00		8.041.414.616,00	23.264.124,00
4	SMK Negeri	390.128.124,00	10.840.799.280,00		10.292.267.875,00	938.659.529,00
	Total	3.351.283.555,00	110.058.149.320,00	163.284.543,00	107.838.604.160,00	5.734.113.258,00

(2) Investasi Jangka Pendek____

_Rp20.000.000.000,00

Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2014 sebesar Rp20.000.000.000,00 yang merupakan deposito berjangka waktu 3 bulan yang dimiliki oleh RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata.

(3) Piutang Pendapatan

_Rp17.569.435.211,00

Piutang Pendapatan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.

Nilai buku piutang pendapatan per 31 Desember 2015 sebesar Rp17.569.435.211,00. Sedangkan nilai piutang bersih sebesar Rp16.877.717.162,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.68 Daftar Piutang Pendapatan per 31 Desember 2015

	31-Des-15	31-Des-14	%
Piutang Pajak	1.317.624.574,00	48.538.569,00	2.714,59
Piutang Retribusi	2.214.496.801,00	2.939.898.020,00	75,33
Piutang Lainnya	-	410.103.686,00	-
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	9.212.511.212,00	5.300.175.871,00	173,82
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	4.824.802.624,00	-	-
Total Piutang Pendapatan	17.569.435.211,00	8.698.716.146,00	201,98
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(691.718.049,00)	(1.194.342.953,00)	57,92
Total Piutang (NRV)	16.877.717.162,00	7.504.373.193,00	224,91

Rincian saldo piutang berdasarkan umur piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih pada Lampiran 3.

(a) Piutang Pajak_______Rp1.317.624.574,00

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.317.624.574,00, terdiri dari:



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.69 Daftar Piutang Pajak per 31 Desember 2015

1.997.500,00 0,00 12.005.500,00	4.995.000,00 4.535.625,00 3.660.000,00
12.005.500,00	
,	3.660.000,00
1.287.431.860,00	-
0,00	486.200,00
10.656.820,00	16.696.400,00
5.064.894,00	18.165.344,00
468.000,00	-
1.317.624.574,00	48.538.569,00
	10.656.820,00 5.064.894,00 468.000,00

(b) Piutang Retribusi

Rp2.214.496.801,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.214.496.801,00, merupakan hak Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima pelunasannya, terdiri dari:

Tabel 5.70 Daftar Piutang Retribusi per 31 Desember 2015

	31-Des-15	31-Des-14
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.971.726.961,00	1.401.045.050
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.655.300,00	0,00
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	95.721.000,00	68.420.000
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	3.723.600,00	0,00
Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	106.821.440,00	1.446.375.420
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	34.848.500,00	24.057.550
Total	2.214.496.801,00	2.939.898.020,00

- ✓ Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan piutang Tahun 2015 pada 19 Puskesmas sebesar Rp724.001.961,00, UPTD Laboratorium Kesehatan sebesar Rp19.762.000,00 dan RSKBD Panti Nugroho sebesar Rp1.227.963.000,00. Piutang tersebut merupakan nilai klaim kepada BPJS Tahun 2015 yang baru diterima di tahun 2016.
- ✓ Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar merupakan Piutang Tahun 2015 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- ✓ Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan piutang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berasal dari:



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.71 Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum per 31 Desember 2015

Uraian	Jumlah
Piutang Tahun 2013	27.356.000,00
Piutang Tahun 2014	19.505.000,00
Piutang Tahun 2015	48.860.000,00
Total	95.721.000,00

✓ Saldo Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan piutang pada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang berasal dari:

Tabel 5.72 Daftar Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2015

Uraian	Jumlah
Piutang Tahun 2012	31.072.120,00
Piutang Tahun 2013	31.072.120,00
Piutang Tahun 2014	44.677.200,00
Total	106.821.440,00

✓ Sedangkan saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan piutang sewa eks tanah bengkok Kelurahan Wirasana Tahun 2015 yang dikelola oleh Bagian Tata Pemerintahan, SETDA.

Rincian Piutang Retribusi per SKPD Tahun 2015 pada Lampiran 4.

(c) Piutang Lain – Lain PAD yang Sah ______Rp9.212.511.212,00 Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2015 sebesar Rp9.212.511.212,00 merupakan Piutang pada BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dengan penjelasan mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.73 Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2015

Saldo Awal 1/1/2015	Piutang 2015	Pelunasan Piutang 2014	Saldo Akhir 31/12/2015
5.300.175.871,00	8.320.484.063,00	4.408.148.722,00	9.212.511.212,00

Nilai piutang sebesar Rp9.212.511.212,00 tersebut di atas, terdiri dari:

P O J

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.74 Daftar Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2015

Uraian	31-Des-15
Piutang Pasien	981.648.810,00
Piutang Klaim Asuransi	8.163.462.402,00
Piutang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	67.400.000,00
Total	9.212.511.212,00

(d) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Rp4.824.802.624,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp4.824.802.624,00 merupakan kurang salur bagi hasil provinsi kepada kabupaten/kota Tahun 2015 sebagaimana surat Kepala DPPA Provinsi Jawa Tengah Nomor 971.1/07512 tanggal 31 Maret 2016.

Rincian kurang salur bagi hasil provinsi Tahun 2015 terdiri dari:

Tabel 5.75 Daftar Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2015

Jenis Bagi Hasil Pajak	31-Des-15
Bagi Hasil PKB	1.758.021.083,00
Bagi Hasil BBNKB	1.413.522.108,00
Bagi Hasil PBBKB	1.649.097.964,00
Bagi Hasil PAP	4.161.469,00
Total	4.824.802.624,00

(e) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rp691.718.049,00

Saldo penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2015 sebesar Rp691.718.049,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.76 Daftar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2015

Uraian	31-Des-15	31-Des-14
Penyisihan Piutang Pajak	(1.976.401,00)	(485.386,00)
Penyisihan Piutang Retribusi	(76.331.730,00)	(573.628.208,00)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(613.409.918,00)	(620.229.359,00)
Total	(691.718.049,00)	(1.194.342.953,00)

(4) Beban Dibayar di Muka Rp482.312.215,50

Beban Dibayar di Muka merupakan belanja SKPD yang dikeluarkan di Tahun 2015 untuk membayar beban tahun 2016. Seluruh saldo beban dibayar di muka tersebut merupakan beban jasa dibayar di muka, yang berupa:

THE RELIEF CONTROL OF THE PERSON OF THE PERS

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.77 Daftar Beban Dibayar di Muka

Uraian	Jumlah	SKPD
Asuransi Barang Milik Daerah	382.655.759,00	DPPKAD dan RSUD
Asuransi Tanggung Gugat	80.570.666,67	RSUD dan RSKBD Panti Nugroho
Beban Listrik	19.085.789,83	16 SKPD
Total	482.312.215,50	

Rincian Beban Dibayar Di Muka per SKPD pada Lampiran 5.

(5) Persediaan_

Rp19.455.300.009,44

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp19.455.300.009,44, terdiri dari:

Tabel 5.78 Daftar Persediaan per 31 Desember 2015

Uraian	31-Des-15
Persediaan Alat Tulis Kantor	257.614.477,00
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	325.508.708,00
Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	4.259.000,00
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	42.959.981,00
Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	5.966.100,00
Persediaan Barang Cetak dan Benda Berharga	522.413.911,95
Persediaan Bahan baku bangunan	748.253.710,00
Persediaan Bahan/bibit tanaman	330.600.000,00
Persediaan Bahan obat-obatan	10.891.899.442,59
Persediaan Bahan kimia	80.286.750,00
Persediaan Bahan Makanan Pokok	21.457.110,00
Persediaan Bahan Pelayanan Kesehatan	3.870.919.592,90
Persediaan Bahan Laboratorium	492.482.341,00
Persediaan Bahan Pangan	90.315.935,00
Persediaan Makanan dan Minuman Pasien	6.499.000,00
Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga	1.763.863.950,00
Total	19.455.300.009,44

Rincian Persediaan per SKPD pada Lampiran 6.

b) Investasi Jangka Panjang___

_Rp163.028.336.334,53

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2015 sebesar Rp163.028.336.334,53 merupakan Investasi Permanen yang berupa Investasi Pemerintah Daerah pada BUMD.



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

(1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Rp0,00

Sesuai dengan Buletin Teknis SAP No 7, Dana Bergulir disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Oleh karena itu, saldo Dana Bergulir yang pada LKPD Tahun 2014 disajikan pada kelompok Aset Lainnya dilakukan resklasifikasi ke Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Dana Bergulir per 31 Desember 2015 disisihkan seluruhnya sebagai Dana Bergulir Diragukan Tertagih karena berumur lebih dari 5 tahun.

Tabel 5.79 Daftar Beban Dibayar di Muka

Uraian	31-Des-15	31-Des-14
Dana Bergulir	0,00	3.218.503.745,00
Total	0,00	3.218.503.745,00

Rincian Dana Bergulir per SKPD dan Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada Lampiran 7.

(2) Investasi Jangka Panjang Permanen Rp163.028.336.334,53
Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2015 sebesar
Rp163.028.336.334,53 merupakan Investasi Pemerintah Daerah pada
BLIMD

Nilai penyertaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah terdiri dari:

Tabel 5.80 Daftar Penyertaan Modal Pemerintah per 31 Desember 2015

	% Kepemilikan	31-Des-2015	31-Des-2014	%
Metode Biaya (Cost Method)			-	
- PT Bank BPD Jawa Tengah		18.739.000.000,00	14.049.000.000,00	111,95
- PT PRPP Jawa Tengah		128.000.000,00	128.000.000,00	100,00
Metode Ekuitas (Equity Method)				
- PDAM Kab. Purbalingga	100,00	60.814099.635,00	52.268.853.611,00	112,04
- PD BPR Artha Perwira	100,00	15.079.078.047,49	12.418.657.037,00	119,03
- PD BPR BKK Purbalingga	44,65	20.483.253.287,76	16.889.306.388,00	121,11
- PD BKK Karangmoncol	47,27	952.167.565,06	1.182.814.637,00	100,11
- PD Purbalingga Ventura	100,00	961.014.969,00	623.607.547,00	119,30
- PD Puspahastama	100,00	1.424.320.602,00	1.502.869.555,00	88,93
- PT BPRS Buana Mitra Perwira	58,28	4.447.095.497,22	3.982.763.761,00	112,53
- PD Owabong	100,00	40.000.306.731,00	35.426.137.272,00	99,70
Jumlah		163.028.336.334,53	138.472.009.808,00	117,73

(a) Investasi pada PT Bank BPD Jawa Tengah dan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dicatat dengan metode biaya (*cost method*) karena kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Purbalingga kurang dari 20% dan tidak memiliki tingkat



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan.

Nilai investasi pada PT Bank BPD Jateng senilai Rp18.7399.000.000,00 merupakan akumulasi penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga. Penambahan nilai investasi pada PT Bank BPD Jateng per 31 Desember 2015 berasal dari tambahan penyertaan modal sebesar Rp4.690.000.000,00.

- (b) Investasi pada BPR BKK Purbalingga senilai Rp20.483.253.288,00 merupakan nilai penyertaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebesar 44,65% dari total ekuitas perusahaan per 31 Desember 2015 (audited) sebesar Rp45.875.147.341,00.
- (c) Investasi pada BPR BKK Karangmoncol (hasil merger antara BKK Kejobong dan BKK Karangmoncol) senilai Rp952.167.565,00 merupakan nilai penyertaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebesar 47,27% dari total ekuitas perusahaan per 31 Desember 2015 (audited) sebesar Rp2.014.316.829,00.
- (d) Investasi pada **BPRS** Buana Mitra Perwira senilai Rp4.447.095.497,00 merupakan nilai penyertaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebesar 58,28% dari total ekuitas perusahaan 31 Desember 2015 (audited) sebesar per Rp7.630.568.801,00.

c) Aset Tetap

Rp1.424.578.963.771,63

Nilai aset tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.136.067.896.521,00 sedangkan nilai bersih aset tetap setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan adalah sebesar Rp1.424.578.963.771,63, yang terdiri dari:

Tabel 5.81 Daftar Aset Tetap per 31 Desember 2015

	31-Des-15	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-14
Tanah	420.474.535.195,00	18.187.989.102,00	11.357.875.030,00	413.644.421.123,00
Peralatan dan Mesin	281.639.668.241,00	73.672.309.384,00	19.051.436.373,00	227.018.795.230,00
Gedung dan Bangunan	637.338.882.723,00	133.988.959.948,00	24.003.634.719,00	527.353.557.494,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	747.657.668.675,00	121.708.712.559,00	1.573.809.350,00	627.522.765.466,00
Aset tetap Lainnya	42.677.703.614,00	4.969.263.064,00	441.389.509,00	38.149.830.059,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	6.279.438.073,00	8.360.979.023,00	761.323.600,00	443.646.600,00
Jumlah	2.136.067.896.521,00	360.888.213.080,00	57.189.468.581,00	1.834.133.015.972,00
Akumulasi Penyusutan	(711.488.932.749,37)			(616.185.957.768,59)
Nilai Bersih	1.424.578.963.771,63			1.217.947.058.203,41

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp6.279.438.073,00 terdiri dari:

P O T

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.82 Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015

Uraian	31-Des-15
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	86.980.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat	1.729.975,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran	1.547.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.097.754.898,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan	76.194.200,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan	8.092.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah	7.140.000,00
Total	6.279.438.073,00

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD pada Lampiran 8.

Mutasi tambah aset tetap Tahun 2015 berasal dari (a) belanja modal,

- (b) belanja barang dan jasa, (c) hibah, (d) mutasi dari SKPD lain,
- (e) reklasifikasi aset tetap, dan (f) barang belum tercatat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.83 Daftar Mutasi Tambah Aset Tetap Tahun 2015

	Tanah	Peralatan dan	Gedung dan	Jalan, Irigasi dan	Aset Tetap	KDP	
	Tanan	Mesin	Bangunan	Jaringan	Lainnya	KDF	
Belanja Modal	5.179.573.602,00	40.534.479.834,00	52.645.741.812,00	66.073.790.125,00	434.144.500,00	5.826.540.173,00	
Belanja Barang							
dan Jasa	-	436.889.100,00	4.330.811.600,00	54.282.569.284,00	105.143.485,00	2.534.438.850,00	
Hibah	116.250.000,00	13.736.153.724,00	12.679.654.770,00	202.918.650,00	4.092.380.002,00	-	
Mutasi Masuk	5.291.201.500,00	14.457.592.712,00	12.303.623.360,00	-	12.116.009,00	-	
Reklasifikasi	-	342.475.000,00	1.604.374.500,00	21.700.000,00	-	-	
Barang Temuan /							
Koreksi Tambah	7.600.964.000,00	4.164.719.014,00	50.424.753.906,00	1.127.734.500,00	325.479.068,00		
Jumlah	18.187.989.102,00	73.672.309.384,00	133.988.959.948,00	121.708.712.559,00	4.969.263.064,00	8.360.979.023,00	

(1) Penambahan aset tetap dari Belanja Modal Tahun 2015 sebesar Rp170.694.270.046,00.

Total belanja modal Tahun 2015 sebesar Rp170.645.780.046,00 sedangkan penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal sebesar Rp170.693.270.046,00. Terdapat selisih sebesar Rp48.490.000,00, karena:

- (+) Belanja Modal pada BPPKP yang telah menghasilkan aset tetap, tetapi belum direalisasikan pembayarannya (utang pengadaan aset tetap) sebesar Rp46.390.000,00.
- (+) Belanja Modal pada SMA Negeri 2 Purbalingga yang telah menghasilkan aset tetap, tetapi belum direalisasikan pembayarannya (utang pengadaan aset tetap) sebesar Rp16.100.000,00.
- (-) Belanja Modal pada BKD yang tidak menghasilkan aset tetap sebesar Rp14.000.000,00.



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Rincian penambahan aset tetap dari Belanja Modal Tahun 2015 per SKPD pada Lampiran 9.

(2) Penambahan aset tetap dari belanja barang dan jasa Tahun 2015 sebesar Rp61.689.852.319,00.

Pada beberapa SKPD, terdapat belanja barang dan jasa yang secara substansi menghasilkan aset tetap atau dapat dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset tetap. Nilai terbesar terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum yang berupa belanja pemeliharaan yang dianggarkan kelompok Belanja Barang dan Jasa, tetapi sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, termasuk kategori pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset tetap.

Rincian penambahan aset tetap yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa per SKPD Tahun 2015 pada Lampiran 10.

(3) Penambahan aset tetap dari hibah Tahun 2015 sebesar Rp30.827.357.146,00.

Penambahan aset tetap yang berasal dari hibah berasal dari hibah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BOS, Komite serta Masyarakat/Perorangan Tahun 2015.

Dari total hibah sebesar Rp30.827.357.146,00, tidak seluruhnya dicatat sebagai aset tetap pada Neraca, akan tetapi sebesar Rp209.840.348,00 direklasifikasi ke dalam Barang Ekstrakomptabel karena nilainya di bawah satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*). Hibah aset ini akan disajikan kembali dalam Laporan Operasional terkait dengan pendapatan hibah – LO sebesar nilai aset yang tercatat di Neraca. Rincian penambahan aset tetap yang berasal dari hibah Tahun 2015 pada Lampiran 11.

- (4) Penambahan aset tetap karena mutasi dari SKPD lain Tahun 2015 sebesar Rp32.064.533.581,00.
 - Penambahan aset tetap tersebut akan sama besar dengan pengurangan aset tetap yang dimutasikan ke SKPD lain.
 - Rincian penambahan aset tetap yang berasal dari mutasi dari SKPD Tahun 2015 pada Lampiran 12.
- (5) Penambahan aset tetap dari reklasifikasi aset sebesar Rp1.968.549.500,00.
 - Penambahan tersebut berasal dari reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai pembangunannya maupun reklasifikasi antar jenis aset tetap, yang terdapat pada 7 SKPD, yaitu:



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.84 Daftar Penambahan Aset Tetap yang Berasal dari Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun 2015

SKPD	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah
SMK Negeri 1 Bojongsari	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00
UPTD Puskesmas Rembang	900.000,00	-	-	900.000,00
RSUD Goeteng Taroenadibrata	170.000.000,00	54.685.600,00	-	224.685.600,00
Dinas Pekerjaan Umum	-	5.091.500,00	-	5.091.500,00
Bappeda	171.575.000,00	-	-	171.575.000,00
BKBPP	-	843.050.900,00	21.700.000,00	864.750.900,00
Dinperindagkop	-	693.546.500,00	-	693.546.500,00
Total	342.475.000,00	1.604.374.500,00	21.700.000,00	1.968.549.500,00

✓ Penambahan yang berasal dari reklasifikasi KDP menjadi aset tetap terdapat pada:

Tabel 5.85 Daftar Penambahan yang Berasal dari Reklasifikasi KDP menjadi Aset
Tetap Tahun 2015

	Jumlah
SMK Negeri 1 Purbalingga	8.000.000,00
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	54.685.600,00
Dinas Pekerjaan Umum	5.091.500,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	693.546.500,00
Total	761.323.600,00

✓ Penambahan yang berasal dari reklasifikasi dari kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan menjadi Peralatan dan Mesin:

Tabel 5.86 Daftar Penambahan Penambahan yang berasal dari reklasifikasi dari kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan menjadi Peralatan dan Mesin Tahun 2015

	Jumlah
UPTD Puskesmas Rembang	900.000,00
RSUD Goeteng Taroenadibrata	170.000.000,00
Total	170.900.000,00

- ✓ Penambahan yang berasal dari reklasifikasi dari kelompok Gedung dan Bangunan menjadi Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdapat pada BKBPP sebesar Rp21.700.000,00.
- (6) Penambahan aset tetap dari barang temuan/koreksi tambah sebesar Rp63.643.650.488,00.

Penambahan aset tetap dari barang temuan/koreksi tambah adalah penambahan aset tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2015 tetapi baru dilakukan pencatatan di Tahun 2015 karena baru terdapat dokumen serah terima aset tetap yang handal.

Rincian penambahan aset tetap yang berasal dari barang temuan per SKPD Tahun 2015 pada Lampiran 13.



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Mutasi kurang aset tetap Tahun 2015 terjadi karena (a) koreksi kebijakan, (b) Mutasi ke SKPD lain (c) Reklasifikasi Aset (d) Reklasifikasi ke Aset Lainnya (e) Koreksi Pencatatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.87 Daftar Mutasi Kurang Aset Tetap Tahun 2015

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP
Koreksi Kebijakan	-	3.248.013.815,00	76.927.654,00	-	-	-
Mutasi ke SKPD Lain	5.291.201.500,00	14.457.592.712,00	12.303.623.360,00	-	12.116.009,00	-
Reklasifikasi Aset	-	171.575.000,00	864.750.900,00	170.900.000,00	-	761.323.600,00
Reklasifikasi ke Aset Lain- Lain	3.950.405.168,00	1.065.030.096,00	4.062.135.737,00	84.214.000,00	429.273.500,00	
Reklasifikasi ke Persediaan	-	-	-	-	-	1.763.863.950,00
Koreksi Pencatatan	2.116.268.362,00	109.224.750,00	6.696.197.068,00	1.318.695.350,00	-	-
Jumlah	11.357.875.030,00	19.051.436.373,00	24.003.634.719,00	1.573.809.350,00	441.389.509,00	1.763.863.950,00

(1) Pengurangan aset tetap karena koreksi kebijakan minimum kapitalisasi sebesar Rp3.324.941.469,00.

Pengurangan tersebut karena terdapat aset tetap yang diperoleh di Tahun 2015 yang secara kualitatif memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai aset tetap akan tetapi nilainya berada di bawah satuan minimum kapitalisasi aset tetap, yaitu:

- ✓ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- ✓ Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- (2) Pengurangan aset tetap karena mutasi ke SKPD lain sebesar Rp32.064.533.581,00.
 - Nilai pengurangan tersebut sama dengan nilai penambahan aset tetap yang berasal dari SKPD lainnya.
 - Rincian pengurangan aset tetap karena mutasi ke SKPD lain Tahun 2015 pada Lampiran 14.
- (3) Pengurangan aset tetap karena reklasifikasi aset sebesar Rp1.968.549.500,00.
 - Nilai pengurangan tersebut sama dengan nilai penambahan aset tetap yang berasal reklasifikasi aset tetap pada 7 SKPD. Rincian pengurangan aset tetap tersebut terdiri dari:



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.88 Daftar Pengurangan Aset Tetap yang Berasal dari Reklasifikasi antar Aset TetapTahun 2015

S KPD	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	KDP	Jumlah
SMK Negeri 1 Bojongsari	-	-	-	8.000.000,00	8.000.000,00
UPTD Puskesmas Rembang	-	-	900.000,00	-	900.000,00
RSUD Goeteng Taroenadibrata	-	-	170.000.000,00	54.685.600,00	224.685.600,00
Dinas Pekerjaan Umum	-	-	-	5.091.500,00	5.091.500,00
Bappeda	171.575.000,00	-	-	-	171.575.000,00
BKBPP	-	864.750.900,00	-	-	864.750.900,00
Dinperindagkop	-	-	-	693.546.500,00	693.546.500,00
Total	171.575.000,00	864.750.900,00	170.900.000,00	761.323.600,00	1.968.549.500,00

Penjelasan lebih detail mengenai reklasifikasi aset bisa dilihat pada bagian penjelasan atas penambahan aset tetap dari reklasifikasi aset.

- (4) Pengurangan aset tetap karena reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp9.591.058.501,00.
 - Reklasifikasi ke aset lain-lain dilakukan terhadap aset tetap yang dalam kondisi rusak berat maupun tidak ditemukan fisiknya. Total aset tetap yang direklasifikasi ke aset lain-lain tersebut terdapat pada 35 SKPD dengan rincian pada Lampiran 15.
- (5) Pengurangan aset tetap karena reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp1.763.863.950,00.

Dilakukan reklasifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke dalam kelompok Persediaan dikarenakan status KDP yang merupakan aset-aset milik pihak ketiga yang akan diserahterimakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum yang direklasifikasi ke dalam kelompok Persediaan, antara lain:

Tabel 5.89 Daftar Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi dari KDP ke Persediaan
Tahun 2015

Tuliuli 2010	
	Jumlah
Gedung BAZNAS Kab. Purbalingga	349.852.950,00
Gedung Korpri	1.167.347.000,00
Hutan Kota SMK Negeri 3 Purbalingga	123.762.000,00
Taman Terbuka Hijau Purbalingga Wetan	122.902.000,00
Total	1.763.863.950,00

(6) Pengurangan aset tetap karena koreksi pencatatan sebesar Rp10.240.385.530,00.

Koreksi pencatatan dilakukan terhadap aset tetap yang mengalami pencatatan ganda yang terdapat pada 15 SKPD sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.90 Daftar Pengurangan Aset Tetap karena Koreksi Pencatatan Ganda Tahun 2015

SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan	Jumlah
UPT Dinas Pendidikan Kec. Padamara	-	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00
SMK Negeri 2 Purbalingga	-	7.500.000,00	296.000.000,00	-	303.500.000,00
SMP Negeri 1 Karanganyar	462.843.562,00	-	-	-	462.843.562,00
SMK Negeri 1 Bojongsari	-	-	146.000.000,00	-	146.000.000,00
RSUD Goeteng Taroenadibrata	-	-	94.989.800,00	-	94.989.800,00
Dinhubkominfo	-	-	5.360.683.268,00	-	5.360.683.268,00
Dinperindagkop	528.000.000,00	-	-	-	528.000.000,00
Sekretariat Daerah	38.550.000,00	-	-	-	38.550.000,00
Sekretariat DPRD	-	13.650.000,00	-	-	13.650.000,00
DPPKAD	-	16.574.750,00	-	-	16.574.750,00
Kelurahan Bojong	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
Kelurahan Bancar	427.884.000,00	-	-	-	427.884.000,00
Kelurahan Karangmanyar	99.690.800,00	-	-	-	99.690.800,00
Kelurahan Kalikabong	559.300.000,00	-	-	-	559.300.000,00
Dinas Peternakan dan Perikanan	-	-	798.524.000,00	1.318.695.350,00	2.117.219.350,00
Total	2.116.268.362,00	109.224.750,00	6.696.197.068,00	1.318.695.350,00	10.240.385.530,00

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2015 sebesar Rp711.488.932.749,37 mengalami peningkatan sebesar Rp95.302.974.980,78 atau naik sebesar 15,46% dari saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2014 (*Restated*).

d) Dana Cadangan_

Rp15.082.297.878,00

Nilai Dana Cadangan per 31 Desember 2015 sebesar Rp15.082.297.878,00 merupakan saldo Dana Cadangan Pembangunan Bandar Udara Wirasaba, sedangkan Dana Cadangan yang dibentuk di Tahun 2014 telah dicairkan seluruhnya di Tahun 2015.

- (1) Dasar Hukum
 - Dana Cadangan Pembangunan Bandar Udara Wirasaba dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 11 September 2015.
- (2) Tujuan Pembentukan
 - Dana Cadangan Pembangunan Bandar Udara Wirasaba dibentuk dengan tujuan untuk pengembangan Bandar Udara Wirasaba sebagai bandara komersial.
- (3) Nilai
 - Nilai awal Dana Cadangan Pembangunan Bandar Udara Wirasaba adalah sebesar Rp15.000.000.000,000 sesuai dengan SP2D-9624/LS/BAN.SOS/1.20.05.02/2015 tanggal 11 November 2015. Saldo Dana Cadangan per tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp15.082.297.878,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp82.297.878,00. Penambahan tersebut berasal dari pendapatan jasa giro dana cadangan bulan November dan Desember 2015.



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Pembangunan Bandar Udara Wirasaba, hasil pengelolaan dana cadangan diakumulasikan sebagai penambah nilai dana cadangan. Sehingga secara keseluruhan, perhitungan saldo dana cadangan per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.91 Daftar Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2015

Uraian	31-Des-15
Nilai Awal Pembentukan	15.000.000.000,00
Jasa Giro Dana Cadangan bulan November 2015	31.232.880,00
Jasa Giro Dana Cadangan bulan Desember 2015	51.064.998,00
Total	15.082.297.878,00

e) Aset Lainnya

Rp28.687.700.989,00

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp28.687.700.989,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.92 Daftar Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2015

	31-Des-2015	31-Des-2014	%
Tagihan Jangka Panjang	25.638.189,00	25.638.189,00	100,00
Dana Bergulir	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	1.769.471.083,00	2.263.986.083,00	78,16
Aset Lain-lain	26.892.591.717,00	17.301.533.216,00	155,43
Jumlah	28.687.700.989,00	19.591.157.488,00	146,43

(1) Tagihan Jangka Panjang ________ Rp25.638.189,00 Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2014 adalah Rp25.638.189,00 atau sama dengan posisi per 31 Desember 2014 merupakan Tuntutan Perbendaharaan terhadap Sdr. Eko Kartiko, PNS pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang melakukan penggelapan uang Daerah. Sekarang yang bersangkutan sudah diberhentikan dari PNS sehingga angsuran pengembaliannya menjadi macet.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melakukan berbagai upaya penagihan termasuk melakukan penyerahan pengurusan piutang tersebut kepada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara melalui surat Nomor 900/2811 tanggal 14 September 2012 namun belum mendapatkan respon dari KPKLN.

(2) Dana Bergulir Rp0,00 Saldo Aset Lainnya – Dana Bergulir per 31 Desember 2015 adalah Rp0,00. Sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 7, Dana Bergulir disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Oleh karena itu, saldo Dana Bergulir pada

Rp1.769.471.083,00, yang terdiri dari:



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

kelompok Aset Lainnya dilakukan resklasifikasi ke Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. (3) Aset Tidak Berwujud Rp1.769.471.083,00 Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2015 adalah sebesar

Tabel 5.93 Daftar Saldo Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2015

	31-Des-2015	31-Des-2014	%
Software	1.097.761.083,00	1.279.926.083,00	85,77
Kajian	671.710.000,00	984.060.000,00	68,26
Jumlah	1.769.471.083,00	2.263.986.083,00	78,16

Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD pada Lampiran 16.

(4) Aset Lain-Lain Rp26.892.591.717,00 Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp26.892.591.717,00. Aset Lain-Lain tersebut merupakan Barang Rusak Berat dan Barang Tidak Ada yang sampai tanggal laporan belum dihapuskan atau masih dalam proses penghapusan.

Jumlah tersebut berasal dari saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2014 sebesar Rp17.301.533.216,00 ditambah dengan reklasifikasi dari Aset Tetap di Tahun 2015 sebesar Rp9.591.058.501,00.

Tabel 5.94 Daftar Saldo Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2015

	31-Des-2015	31-Des-2014 (restated)
Aset Lain-Lain	26.892.591.717,00	17.301.533.216,00
Jumlah	26.892.591.717,00	17.301.533.216,00

Rincian Aset Lain-Lain per SKPD pada Lampiran 17.

3) KEWAJIBAN

Rp22.423.402.808,51

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Nilai Kewajiban Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2015 sebesar Rp22.423.402.808,51, atau turun 14,58% dari nilai kewajiban per 31 Desember 2014. Nilai kewajiban tersebut terdiri dari:

Tabel 5.95 Daftar Kewajiban Daerah per 31 Desember 2015

	31-Des-2015	31-Des-2014 (restated)
Kewajiban Jangka Pendek	16.372.395.325,51	19.680.381.450,00
Kewajiban Jangka Panjang	6.051.007.483,00	6.568.861.846,00
Jumlah	22.423.402.808,51	26.249.243.296,00

a) Kewajiban Jangka Pendek Rp16.372.395.325,51



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal pelaporan.

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 sebesar Rp16.372.395.325,51 atau turun 16,81% dari saldo per 31 Desember 2014 (*restated*), yang terdiri dari:

Tabel 5.96 Daftar Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015

	31-Des-2015	31-Des-2014 (restated)
Utang PFK	8.785.403.635,00	10.003.173.920,00
Utang Bunga	1.913.393,00	9.504.569,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31.860.374,00	63.720.745,00
Pendapatan Diterima di Muka	582.245.042,51	8.213.844
Utang Belanja	6.129.079.682,00	9.086.661.773,00
Utang Jangka Pendek lainnya	841.893.199,00	509.106.599,00
Jumlah	16.372.395.325,51	19.680.381.450,00

(1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) ______Rp8.785.403.635,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, Taperum, Iuran Jaminan Kematian dan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja.

Termasuk Utang PFK adalah penerimaan dana Jamkesda dan Retensi (jaminan pemeliharaan) yang sampai dengan 31 Desember 2015 belum dimintakan pencairannya.

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2015 sebesar Rp8.785.403.635,00, mengalami penurunan 12,39% dari posisi per 31 Desember 2014 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.97 Daftar Utang PFK per 31 Desember 2015

	31-Des-2015	31-Des-2014
Utang Jamkesda	155.775.000,00	173.250.000,00
Utang Retensi	8.629.177.545,00	9.829.923.920,00
Tahun 2011	154.108.550,00	154.108.550,00
Tahun 2012	177.350.050,00	225.388.000,00
Tahun 2013	104.731.350,00	170.039.330,00
Tahun 2014	668.889.150,00	9.280.388.040,00
Tahun 2015	7.524.098.445,00	-
Utang Pajak	451.090,00	-
Jumlah	8.785.403.635,00	10.003.173.920,00

(a) Utang Jamkesda sebesar Rp155.775.000,00 merupakan saldo dana pungutan kepesertaan UPTD Jamkesda yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 masih ada di RKUD karena belum digunakan untuk pembayaran klaim Jamkesda.



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

(b) Utang Retensi (Jaminan Pemeliharaan) per 31 Desember 2015 sebesar Rp8.629.177.545,00 merupakan keseluruhan dana retensi 5% dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sampai dengan tanggal pelaporan masih ada di RKUD, yang berasal dari dana retensi tahun 2011 – 2015, dengan perhitungan:

Tabel 5.98 Daftar Mutasi Utang Retensi per 31 Desember 2015

	Jumlah
Saldo Awal 1 Januari 2015	9.829.923.920,00
(+) Penerimaan Retensi Tahun 2015	7.524.098.445,00
(-) Pengeluaran Retensi di Tahun 2015:	
Retensi Tahun 2012	48.037.950,00
Retensi Tahun 2013	65.307.980,00
Retensi Tahun 2014	8.611.498.890,00
Saldo Akhir 31 Desember 2015	8.629.177.545,00

(c) Utang Pajak yang belum disetor berasal dari SKPD Kelurahaan Bojong sebesar Rp451.090,00.

(2) Utang Bunga

Rp1.913.393,00

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.913.393,00, berkurang Rp7.591.176,00 atau turun 79,87% dari saldo utang bunga per 31 Desember 2014. Saldo Utang Bunga tersebut terdiri dari Bunga Rp1.872.682,00 ditambah Jasa Bank Rp40.711,00 sesuai dengan surat tagihan dari Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta Nomor S-1320/WPB.12/KP.10/2015 tanggal 29 Desember 2015.

Tabel 5.99 Perhitungan Utang Bunga per 31 Desember 2015

31-Des-15	31-Des-14
1.872.682,00	9.302.344,00
-	5.618.046,00
-	3.684.298,00
1.872.682,00	-
40.711,00	202.225,00
-	122.131,00
-	80.094,00
40.711,00	-
1.913.393,00	9.504.569,00
	1.872.682,00 1.872.682,00 40.711,00 - 40.711,00

Utang bunga tersebut merupakan utang bunga atas Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat berupa Penerusan Pinjaman dari ADB sesuai dengan Loan Agreement No.1198-INO tanggal 10 Pebruari 1993 dan perjanjian penerusan pinjaman No. SLA-867/DP3/1996 tanggal 31 Januari 1996.



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Utang Bunga tersebut telah dilunasi pada tanggal 28 Januari 2016 dengan penerbitan SP2D-00119/LS/BAN.SOS/1.20.05.02/2016 sebesar Rp1.913.393,00.

(3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang ______Rp31.860.374,00 Saldo Bagian Lancar Utang Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2015 sebesar Rp31.860.374,00 merupakan bagian lancar dari utang jangka panjang atas penerusan Pinjaman ADB *Loan Agreement* yang akan jatuh tempo tanggal 31 Januari 2016.

Tabel 5.100 Perhitungan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2015

31-Des-15	31-Des-14
-	31.860.372,70
-	31.860.372,70
31.860.372,70	-
31.860.372,70	63.720.746,00
	31.860.372,70

Jumlah tersebut sesuai dengan surat tagihan dari Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta Nomor S-1320/WPB.12/KP.10/2015 tanggal 29 Desember 2015.

Tabel 5.101 Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2015

	31-Des-15	31-Des-14
Pendapatan Diterima di Muka	582.245.042,51,00	8.213.844,00
Jumlah	582.245.042,51,00	8.213.844,00

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal 31 Desember 2015 terdapat pada:

- (a) RSUD Goeteng Taroenadibrata______Rp17.125.000,00 Merupakan pendapatan dari biaya pendidikan dan pelatihan, magang ataupun penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa/mahasiswi dari berbagai Perguruan Tinggi baik Negeri/Swasta dengan perjanjian/MOU antara pihak Perguruan Tinggi dengan Rumah Sakit.
- (c) DPPKAD_______Rp252.019.508,11

 Merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa kios dan tanah yang dibayar di Tahun 2015 dan berakhir tahun 2016 sebesar



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

		Rp5.348.495,00 dan koreksi tambah ata dimuka Pajak Reklame yang berakhir Tahu pada Tahun 2015 sebesar Rp246.671.013,1	n 2016, namun diterima
	(d)	KPMPT	r sampai dengan Tahun
(5)	Uta mau pen	ng Belanjang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah upun pihak ketiga pemanfaatan sumber o yerahan barang/jasa yang sampai dengan al ksanakan pembayarannya.	laya ekonomi maupun
	Salo dari	do Utang Belanja Tahun 2015 sebesar Rp6	5.129.079.682,00 terdiri
		Tabel 5.102 Daftar Utang Belanja per 31 De	sember 2015
			Jumlah
		ng Belanja Pegawai	1.265.949.377,00
	Utar Jum	ng Belanja Barang dan Jasa 	4.863.130.305,00 6.129.079.682,00
	Juin		0.123.073.002,00
	(a)	Utang Belanja Pegawai merupakan kewaji kepada Pegawai Negeri Sipil yang berupa p	
		Total Utang Belanja Pegawai per 31 D Rp1.265.949.377,00 yang terdapat pada 105	
		Rincian Utang Belanja pegawai per SK Lampiran 18.	PD Tahun 2015 pada
	(b)	Utang Belanja Barang dan Jasa Utang Belanja Barang dan Jasa merupakar Daerah kepada pegawai negeri maupun pi dengan konsumsi barang / jasa Tahun 2015 Desember 2015 belum dilakukan pembayar	n kewajiban Pemerintah hak ketiga yang terkait yang sampai dengan 31
		Total Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Rp4.863.130.305,00 yang terdapat pada 27	
		Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per Lampiran 19.	SKPD Tahun 2015 pada
(6)	Uta	ng Jangka Pendek Lainnya	Rp841.893.199,00
` ′	Salo	do Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 I 341.893.199,00 yang terdiri dari:	



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.103 Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2015

Uraian	Jumlah	SKPD
Utang Retensi (Pemeliharaan)	295.322.600,00	RSUD Goeteng T.
Pendapatan Diterima Dimuka	484.080.599,00	Dinperindagkop
Utang Pengadaan Aset Tetap	16.100.000,00	SMA N 2 Purbalingga
	46.390.000,00	BPPKP
Total	841.893.199,00	

(a) Utang Retensi BLUD _______Rp295.322.600,00 Utang Retensi BLUD merupakan jaminan pemeliharaan (retensi) 5% atas pekerjaan konstruksi pada BLUD RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata.

Jumlah tersebut berasal dari:

Saldo akhir 31 Des 2015	Rp295.322.600,00
(-) Pengeluaran retensi 2015	Rp11.063.500,00
(+) Penerimaan retensi 2015	Rp281.360.100,00
Saldo awal 1 Jan 2015	Rp25.026.000,00

(b) Pendapatan Diterima Dimuka (2016) ______Rp484.080.599,00 Pendapatan Diterima Dimuka atas pembayaran sewa kios Pasar Segamas yang merupakan porsi tahun 2016 sebesar Rp484.080.599,00.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa kios pasar segamas dapat dilihat pada penjelasan atas Utang Jangka Panjang Lainnya.

(c) Utang Pengadaan Aset Tetap Rp62.490.000,00 Utang Pengadaan Aset Tetap merupakan porsi kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atas kontrak pengadaan aset tetap yang telah diselesaikan pembangunannya di Tahun 2015 namun belum dilaksanakan pembayarannya di Tahun 2015.

Utang Pengadaan Aset Tetap terdapat pada 2 SKPD, yaitu:

Tabel 5.104 Daftar Utang Pengadaan Aset Tetap per 31 Desember 2015

	Jumlah
BPPKP	46.390.000,00
SMA Negeri 2 Purbalingga	16.100.000,00
Jumlah	62.490.000,00

b) Kewajiban Jangka Panjang______Rp6.051.007.483,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2015 sebesar Rp6.051.007.483,00, berkurang Rp517.854.363,00 atau turun 7,88% dari posisi per 31 Desember 2014, yang berupa:

P D T

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.105 Daftar Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2015

	31-Des-2015	31-Des-2014
Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	-	33.773.764,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	6.051.007.483,00	6.535.088.082,00
Jumlah	6.051.007.483,00	6.568.861.846,00

(1) Utang Dalam Negeri

Rp0,00

Per tanggal 31 Desember 2015, Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah tidak memiliki saldo Kewajiban Jangka Panjang-Utang Dalam Negeri.

Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman dari ADB sesuai dengan Loan Agreement No.1198-INO tanggal 10 Pebruari 1993 dan perjanjian penerusan pinjaman No. SLA-867/DP3/1996 tanggal 31 Januari 1996 akan jatuh tempo seluruhnya pada tanggal 31 Januari 2016 sebesar Rp31.860.374,00.

(2) Utang Jangka Panjang Lainnya Rp6.051.007.483,00

Pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Purbalingga menerima pendapatan sewa kios/lapak/pelataran Pasar Segamas dari para pengguna/penyewa sebesar Rp9.681.611.975,00 untuk periode 5 tahun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Segamas, uang sewa tersebut kemudian dialihkan menjadi pembayaran retribusi pelayanan jasa tempat usaha untuk jangka waktu 20 tahun sejak surat pernyataan sewa Tahun 2009 atau terhitung mulai 1 Juni 2009 s.d. 30 Mei 2029, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.106 Daftar Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2015

Tahun	Sewa Dibayar Dimuka	Biaya Sewa
1-Jun-09	9.681.611.975,00	242.040.299,38
2010	9.439.571.675,63	484.080.598,75
2011	8.955.491.076,88	484.080.598,75
2012	8.471.410.478,13	484.080.598,75
2013	7.987.329.879,38	484.080.598,75
2014	7.503.249.280,63	484.080.598,75
2015	7.019.168.681,88	484.080.598,75
2016	6.535.088.083,13	484.080.598,75
2017	6.051.007.484,38	484.080.598,75
2018	5.566.926.885,63	484.080.598,75
2019	5.082.846.286,88	484.080.598,75
2020	4.598.765.688,13	484.080.598,75
2021	4.114.685.089,38	484.080.598,75
2022	3.630.604.490,63	484.080.598,75
2023	3.146.523.891,88	484.080.598,75
2024	2.662.443.293,13	484.080.598,75
2025	2.176.362.694,38	484.080.598,75
2026	1.694.282.095,63	484.080.598,75
2027	1.210.201.496,88	484.080.598,75
2028	720.120.898,13	484.080.598,75
2029	242.040.299,38	242.040.299,38



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

4) EKUITAS _______Rp1.925.011.284.520,59

Nilai Ekuitas Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.925.011.284.520,59 atau meningkat Rp334.861.248.269,51 (20,06%) dari posisi per 31 Desember 2014 (restated).

Tabel 5.107 Nilai Ekuitas per 31 Desember 2015

Uraian	31-Des-15	31-Des-14 (restated)
Ekuitas	1.925.011.284.520,59	1.590.150.036.251,08
Total	1.925.011.284.520,59	1.590.150.036.251,08

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a. PENDAPATAN – LO _______ Rp1.716.058.294.420,16

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Purbalingga yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan—LO Tahun 2015 sebesar Rp1.716.058.294.420,16. Pendapatan Operasional tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp229.425.909.052,20, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.281.556.780.223,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp205.075.605.144,96 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.108 Realisasi Pendapatan-LO Tahun 2015

	-	2015 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah – LO	-	229.425.909.052,20
Pendapatan Transfer – LO		1.281.556.780.223,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO		205.075.605.144,96
	Total	1.716.058.294.420,16

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1) **Pendapatan Asli Daerah – LO______Rp229.425.909.052,20**Saldo Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2015 sebesar Rp229.425.909.052,20, yang terdiri dari:

Tabel 5.109 Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2015

	2015 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	41.729.314.005,89
Pendapatan Retribusi Daerah	31.835.929.908,60
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.818.634.692,71
Lain-lain PAD Yang Sah	134.042.030.445,00
Jumlah	229.425.909.052,20



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Pajak Daerah merupakan PAD yang jenis dan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Purbalingga.

Rincian realisasi Pajak Daerah Tahun 2015 sebesar Rp41.729.314.005,89,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.110 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2015

Uraian	2015 (Rp)
Pajak Hotel - LO	298.705.560,00
Pajak Restoran - LO	2.076.379.539,00
Pajak Hiburan - LO	2.452.077.975,00
Pajak Reklame - LO	536.206.453,89
Pajak Penerangan Jalan - LO	15.903.739.733,00
Pajak Parkir - LO	50.040.134,00
Pajak Air Tanah - LO	848.267.708,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	1.494.565.027,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	14.090.797.868,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	3.978.534.008,00
Jumlah	41.729.314.005,89

Retribusi Daerah merupakan PAD yang jenis dan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing unit SKPD sebagai unit penghasil.

Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2015 mencapai sebesar Rp31.835.929.908,60 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.111 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2015

Uraian	2015 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	19.436.327.919,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	347.956.600,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	1.099.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	753.826.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	3.954.837.792,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	530.569.480,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	50.314.545,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	2.413.704.034,00
Retribusi Terminal - LO	801.228.445,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	1.174.522.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	82.203.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	830.641.500,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	588.440.550,00

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Uraian	_	2015 (Rp)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO		633.171.360,00
Retribusi Izin Gangguan - LO		93.845.683,60
Retribusi Izin Trayek - LO		143.242.000,00
	Jumlah	31.835.929.908,60

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Rp21.818.634.692,71

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten yang berupa pengakuan laba/(rugi) pada 8 BUMD tahun 2015 yang metode pencatatan investasinya menggunakan metode ekuitas dan pendapatan dividen tahun 2015 yang berasal dari PT Bank BPD Jawa Tengah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.112 Bagian Laba/(Rugi) dan Dividen atas Penyertaan Modal BUMD_LO Tahun 2015

BUMD	Laba/(Rugi) 2015 (audited)	% Kepemilikan Saham 2015	Bagian Laba / (Rugi) 2015	Dividen 2015	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4+5)
PD BPR BKK Purbalingga - LO	9.844.848.434,00	44,65%	4.395.724.825,78		4.395.724.825,78
PD BPR Artha Perwira - LO	3.869.059.275,49	100%	3.869.059.275,49		3.869.059.275,49
PD BPRS Buana Mitra Perwira - LO	1.613.494.969,00	58,28%	940.344.867,93		940.344.867,93
PD BPR BKK Karangmoncol - LO	(540.930.623,00)	47,27%	(255.697.905,49)		(255.697.905,49)
PD Purbalingga Modal Ventura - LO	87.407.422,00	100%	87.407.422,00		87.407.422,00
PD OWABONG - LO	4.659.482.750,00	100%	4.659.482.750,00		4.659.482.750,00
PDAM - LO	4.893.829.752,00	100%	4.893.829.752,00		4.893.829.752,00
PD Puspahastama - LO	(78.548.953,00)	100%	(78.548.953,00)		(78.548.953,00)
PT Bank Jateng - LO				3.307.032.658,00	3.307.032.658,00
					21.818.634.692,71

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO_Rp134.042.030.445,00

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber yang bersifat non rutin dan tidak terkait dengan tugas dan fungsi utama dari SKPD.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp134.042.030.445,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.113 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2015

Uraian	2015 (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	642.644.641,00
Penerimaan Jasa Giro - LO	4.659.887.425,00
Pendapatan Bunga - LO	21.382.831.953,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	511.101.971,00
Pendapatan Denda Pajak - LO	5.989.003,00
Pendapatan dari Pengembalian -LO	965.871.850,00
Pendapatan BLUD - LO	68.401.348.315,00

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Uraian		2015 (Rp)
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO		150.706.787,00
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO		18.361.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO		37.141.230.500,00
Pendapatan dari Jamkesda - LO		162.057.000,00
	Jumlah	134.042.030.445,00

Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.281.556.780.223,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.114 Realisasi Pendapatan Tranfer-LO Tahun 2015

Uraian		2015 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO		901.365.883.755,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO		249.255.085.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO		96.238.989.785,00
Bantuan Keuangan - LO		34.696.821.683,00
	Jumlah	1.281.556.780.223,00

a) Transfer Pemerintah Pusat - LO Rp901.365.883.755,00

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp901.365.883.755,00 Tahun 2015 terdiri dari penerimaan transfer sebagai berikut:

Tabel 5.115 Realisasi Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat -LO Tahun 2015

Uraian		2015 (Rp)
Bagi Hasil Pajak - LO		17.263.378.750,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO		6.628.446.005,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO		805.222.229.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO		72.251.830.000,00
	Jumlah	901.365.883.755,00

(1) Bagi Hasil Pajak – LO_______Rp17.263.378.750,00

Bagi Hasil Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Penghasilan, yang terdiri dari:

Tabel 5.116 Realisasi Pendapatan Tranfer Bagi Hasil Pajak Pusat-LO Tahun 2015

Uraian	2015 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO	10.308.034.750,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan - LO	4.655.000,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO	342.853.000,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	6.607.836.000,00
Jumlah	17.263.378.750,00

F O T

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

(2) Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA – LO_____Rp6.628.446.005,00 Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari:

Tabel 5.117 Realisasi Pendapatan Tranfer Bagi Hasil Bukan Pajak -LO Tahun 2015

Uraian	2015 (Rp)
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	171.750.925,00
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO	703.264.033,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	57.172.500,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	22.463.700,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	25.262.197,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Umum - LO	26.900.686,00
Bagi Hasil dari Cukai Tembakau - LO	5.621.631.964,00
Jumlah	6.628.446.005,00

(3) Dana Alokasi Umum – LO______Rp805.222.229.000,00

Besarnya alokasi DAU yang diterima oleh Kabupaten Purbalingga di Tahun 2015 sebesar Rp 805.222.229.000,00.

(4) Dana Alokasi Khusus – LO Rp72.251.830.000,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Jumlah alokasi DAK yang diterima Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 sebesar Rp72.251.830.000,00 dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

Tabel 5.118 Realisasi Pendapatan Tranfer DAK-LO Tahun 2015

Uraian	2015 (Rp)
DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO	6.678.670.000,00
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LO	3.667.860.000,00
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LO	2.856.790.000,00
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LO	1.913.770.000,00
DAK Bidang Keluarga Berencana - LO	1.296.670.000,00
DAK Bidang Kehutanan - LO	1.175.770.000,00
DAK Bidang Kesehatan - LO	5.172.362.000,00
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	2.708.440.000,00
DAK Bidang Perdagangan - LO	1.587.420.000,00
DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO	1.248.180.000,00
DAK Bidang Pertanian - LO	17.541.020.000,00
DAK Bidang Pendidikan - LO	25.969.448.000,00
DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO	435.430.000,00
Jumlah	72.251.830.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

b) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO______Rp 249.255.085.000,00

Penerimaan dana Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Pada Tahun 2015 merupakan Dana Penyesuaian yang terdiri dari Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun 2015 sebesar Rp249.255.085.000,00. Nilai tersebut berupa realisasi Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.119 Realisasi Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2015

Uraian		2015 (Rp)
Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO		248.495.085.000,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO		760.000.000,00
	Jumlah	249.255.085.000,00

c) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO______Rp96.238.989.785,00

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan dana transfer yang berasal dari bagi hasil atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 94 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dana bagi hasil lainnya.

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO terdiri dari realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2015 dan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Tahun 2015 sesuai dengan Surat Kepala DPPA Provinsi Jawa Tengah Nomor 971.1/07512 tanggal 31 Maret 2016. Total Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO terdiri dari:

Tabel 5.120 Realisasi Pendapatan Tranfer Daerah Lainnya-LO Tahun 2015

Uraian	2015 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	91.414.187.161,00
Bagi Hasil Dari PKB	16.995.890.479,00
Bagi Hasil Dari BBNKB	16.676.003.682,00
Bagi Hasil Dari PBBKB	21.615.496.521,00
Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	25.107.407,00
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	36.101.689.072,00
Kurang Salur Bagi Hasil Pajak	4.824.802.624,00
Bagi Hasil Dari PKB	1.758.021.083,00
Bagi Hasil Dari BBNKB	1.413.522.108,00
Bagi Hasil Dari PBBKB	1.649.097.964,00
Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	4.161.469,00
Jumlah	96.238.989.785,00



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

d) Bantuan Keuangan - LO	Rp34.696.821.683,00
Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2015 berasal da	ri Bantuan Keuangan dar
Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya sebesar Rn34	696 821 683 00

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO______Rp205.075.605.144,96 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun sebesar Rp205.075.605.144,96 terdiri dari:

Tabel 5.121 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2015

Uraian	2015 (Rp)
Pendapatan Hibah - LO	138.468.632.144,96
Pendapatan Lainnya - LO	66.606.973.000,00
Jumlah	205.075.605.144,96

a) Pendapatan Hibah – LO

Rp138.468.632.144,96

Realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp138.468.632.144,96 terdiri dari:

Tabel 5.122 Realisasi Pendapatan Hibah-LO Tahun 2015

Uraian	2015 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	12.266.089.950,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	114.411.158.293,96
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	199.988.910,00
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO	11.591.394.991,00
Jumlah	138.468.632.144,96

- (1) Pendapatan Hibah Pemerintah LO terdiri dari:
 - (a) Hibah kepada PDAM sebesar Rp6.774.000.000,00
 - (b) Hibah untuk pelaksanaan implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan sebesar Rp240.922.000,00
 - (c) Hibah Program Water Resource and Irrigation Sector Management Projects (WISMP) untuk pembuatan sarana dan prasarana irigasi sebesar Rp1.411.826.250,00.
 - (d) Hibah aset tetap kepada 10 SKPD sebesar Rp3.839.341.700,00.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya LO terdiri dari:
 - (a) Hibah Dana BOS sebesar Rp 110.058.149.320,00;
 - (b) Hibah berupa alat-alat kontrasepsi pada BKBPP sebesar Rp1.743.368.100,00;
 - (c) Hibah berupa obat-obatan, bahan pelayanan kesehatan dari Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.896.107.286,96.
 - (d) Hibah aset tetap kepada 8 SKPD sebesar Rp713.533.587,00;
- (3) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO terdiri dari pendapatan hibah dari Bank BPD Jawa Tengah kepada SMK Negeri 2 Purbalingga sebesar Rp175.000.000,00 dan Sumbangan Pihak Ketiga terkait dengan pekerjaan perencanaan, konstruksi,



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

pengawasan maupun pemeliharaan di lingkungan Kabupaten Purbalingga sebesar Rp24.988.910,00.

(4) Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat – LO Merupakan hibah asset dari Komite Sekolah kepada 45 SKPD total sebesar Rp11.591.394.991,00.

b) Pendapatan Lainnya-LO_

Rp66.606.973.000,00

Pendapatan Lainnya-LO merupakan realisasi pendapatan Dana Desa Tahun 2015.

b. BEBAN

_Rp1.436.840.195.881,86

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban Tahun 2015 sebesar Rp1.436.840.195.881,86 terdiri dari:

Tabel 5.123 Realisasi Beban Daerah-LO Tahun 2015

Uraian	Jumlah
Beban Operasi	1.268.851.404.141,86
Beban Transfer	167.988.791.740,00
Jumlal	1.436.840.195.881,86

Rincian lebih lanjut mengenai Beban Operasi dan Beban Transfer adalah sebagai berikut:

1) Beban Operasi

Rp1.268.851.404.141,86

Beban Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek pada tahun yang bersangkutan. Beban Operasi meliputi Beban Pegawai – LO, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan Amortisasi dan Beban Penyisihan Piutang.

Realisasi Beban Operasi sebesar Rp1.268.851.404.141,86, yang terdiri dari:

Tabel 5.124 Realisasi Beban Operasi-LO Tahun 2015

Uraian	2015 (Rp)
Beban Pegawai - LO	816.443.946.581,00
Beban Persediaan	184.296.073.722,52
Beban Jasa	65.415.037.523,17
Beban Pemeliharaan	31.814.417.225,00
Beban Perjalanan Dinas	20.728.518.079,00
Beban Bunga	9.504.569,00
Beban Subsidi	500.000.000,00
Beban Hibah	39.928.733.689,00
Beban Bantuan Sosial	4.432.099.977,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	92.279.748.867,00
Beban Penyisihan Piutang	108.048.401,00
Beban Lain-Lain	12.895.275.508,17
Jumla	1.268.851.404.141,86



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

a) Beban Pegawai - LO_____

Rp816.443.946.581,00

Beban Pegawai adalah Beban kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal yang timbul selama periode pelaporan. Beban Pegawai Tahun 2015 sebesar Rp816.443.946.581,00 terdiri dari:

Tabel 5.125 Realisasi Beban Pegawai-LO Tahun 2015

Uraian	2015 (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan	536.522.452.285,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	22.640.627.500,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.202.860.000,00
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.622.387.700,00
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	557.137.118,00
Beban Honorarium PNS	14.388.086.500,00
Beban Honorarium Non PNS	39.898.235.083,00
Beban Uang Lembur	1.052.620.065,00
Beban Penghasilan Lainnya	193.542.958.830,00
Beban Pegawai - Dana BLUD	2.016.581.500,00
Jumlah	816.443.946.581,00

Realisasi Beban Pegawai – LO tersebut lebih tinggi sebesar Rp17.269.268.027,00 dibandingkan Belanja Pegawai – LRA dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.126 Penjelasan Beban Pegawai-LO Lebih Tinggi dari Belanja Pegawai-LRA Tahun 2015

Uraian	Jumlah
Belanja Pegawai - LRA	799.174.678.554,00
(+) Utang Belanja Pegawai 2015	1.265.949.377,00
(+) Utang Belanja Honorarium Non PNS 2015	14.600.000,00
(+) Beban Pegawai BOS	18.192.261.833,00
(-) Utang Belanja Pegawai 2014	(2.165.093.183,00)
(-) Utang Belanja Honorarium Non PNS 2014	(38.450.000,00)
Beban Pegawai - LO	816.443.946.581,00

b) Beban Persediaan_____

Rp184.296.073.722,52

Realisasi Beban Persediaan Tahun 2015 sebesar Rp184.296.073.722,52 terdiri dari:

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.127 Realisasi Beban Persediaan-LO Tahun 2015

Uraian	2015 (Rp)
Beban Bahan Pakai Habis	9.478.715.468,00
Beban Persediaan Bahan/ Material	16.644.209.015,47
Beban Cetak dan Penggandaan	4.872.782.544,05
Beban Makanan dan Minuman	16.267.486.182,00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	373.889.500,00
Beban Pakaian Kerja	617.099.500,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.900.000,00
Beban Barang Dana BOS	76.371.084.962,00
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	777.365.400,00
Beban Barang dan Jasa - Dana BLUD	58.516.329.871,00
Beban Barang dan Jasa Ekstrakom	373.211.280,00
Jumlah	184.296.073.722,52

c) Beban Jasa Rp65.415.037.523,17

Realisasi Beban Persediaan Tahun 2015 sebesar Rp65.415.037.523,17 terdiri dari:

Tabel 5.128 Realisasi Beban Jasa-LO Tahun 2015

Uraian	2015 (Rp)
Beban Jasa Kantor	55.204.909.306,17
Beban Premi Asuransi	762.426.668,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	346.430.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	572.954.000,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.140.219.244,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	269.000.000,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.003.317.105,00
Beban Jasa Konsultasi	3.115.781.200,00
Jumlah	65.415.037.523,17

d) Beban Pemeliharaan_

___Rp31.814.417.225,00

Realisasi Beban Persediaan Tahun 2015 sebesar Rp31.814.417.225,00 terdiri dari:

Tabel 5.129 Realisasi Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2015

Uraian		2015 (Rp)
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor		9.539.580.479,00
Beban Pemeliharaan		22.274.836.746,00
	Jumlah	31.814.417.225,00

e) Beban Perjalanan Dinas_______Rp20.728.518.079,00

Realisasi Beban Persediaan Tahun 2015 sebesar Rp20.728.518.079,00 merupakan total realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2015.



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

f) Beban Bunga Rp9.504.569,00

Realisasi Beban Bunga sebesar Rp9.504.569,00 merupakan pembayaran Bunga dan Jasa Bank Pinjaman ke Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman ADB Loan Agreement No. 1198-INO yang jatuh tempo 31 Januari 2015 dan 31 Juli 2015.

g) Beban Subsidi

Rp500.000.000,00

Realisasi Beban Subsidi sebesar Rp500.000.000,00 merupakan Beban subsidi bunga bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

h) Beban Hibah

Rp39.928.733.689,00

Beban Hibah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Purbalingga atas pemberian hibah.

Realisasi Beban Hibah Tahun 2015 sebesar Rp39.928.733.689,00 terdiri dari:

Tabel 5.130 Realisasi Beban Hibah-LO Tahun 2015

Uraian	2015 (Rp)
Beban Hibah kepada Pemerintah	2.465.874.000,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	2.136.031.127,00
Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	100.000.000,00
Beban Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	15.582.162.692,00
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.644.665.870,00
Jumlah	39.928.733.689,00

i) Beban Bantuan Sosial

Rp4.432.099.977,00

Beban Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban Bantuan Sosial sebesar Rp4.167.099.977,00 terdiri dari:

Tabel 5.131 Realisasi Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2015

Uraian	2015 (Rp)
Beban Bantuan PAMSIMAS	880.000.000,00
Beban Beasiswa Kurang Mampu	725.200.000,00
Beban Bantuan Beasiswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu	200.000.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	800.199.977,00
Beban Bantuan Sosial kepada Anak Yatim Piatu	356.700.000,00
Beban Bantuan Sosial Kepada Panti Asuhan/Werda	185.000.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada PPCI	20.000.000,00
Beban Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin	1.000.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Barang atau Jasa	265.000.000,00
Jumlah	4.432.099.977,00

j) Beban Penyusutan dan Amortisasi______Rp92.279.748.867,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban penyusutan aaset tetap Tahun 2015 yang terdiri dari:

THE DATING

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.132 Realisasi Beban Penyusutan-LO Tahun 2015

Uraian		2015 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		37.323.336.577,90
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		13.091.481.879,17
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan		41.864.930.409,93
	Jumlah	92.279.748.867,00

k) Beban Penyisihan Piutang____

Rp108.048.401,00

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih yang terdiri dari:

Tabel 5.133 Realisasi Beban Penyisihan Piutang-LO Tahun 2015

Uraian	2015 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.902.025,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	68.884.330,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	37.262.046,00
Jumlah	108.048.401,00

l) Beban Lain-Lain_

Rp 12.895.275.508,17

Beban Lain-Lain merupakan Beban penurunan nilai investasi permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD. Penurunan nilai investasi permanen diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.134 Nilai Investasi Permanen Berdasarkan Perhitungan Awal

BUMD	Investasi Permanen 1 Jan 2015	Tambahan Modal	Bagian Laba / Rugi	Investasi Permanen 31 Des 2015
PD BPR BKK PURBALINGGA	16.889.306.388,00	2.242.000.000,00	4.395.724.825,78	23.527.031.213,78
PD BPR ARTHA PERWIRA	12.418.657.037,00	1.450.000.000,00	3.869.059.275,49	17.737.716.312,49
PT BPRS BUANA MITRA PERWIRA	3.982.763.761,00	470.000.000,00	940.344.867,93	5.393.108.628,93
PD BKK KARANGMONCOL	1.182.814.637,00	50.000.000,00	(255.697.905,49)	977.116.731,51
PD PURBALINGGA VENTURA	623.607.547,00	250.000.000,00	87.407.422,00	961.014.969,00
PD OWABONG	35.426.137.272,00	2.500.000.000,00	4.659.482.750,00	42.585.620.022,00
PDAM	52.268.853.611,00	7.288.000.000,00	4.893.829.752,00	64.450.683.363,00
PD PUSPAHASTAMA	1.502.869.555,00		(78.548.953,00)	1.424.320.602,00
PT BPD JATENG CAB. PBG	14.049.000.000,00	4.690.000.000,00		18.739.000.000,00
PT PRPP JATENG	128.000.000,00			128.000.000,00
	138.472.009.808,00	18.940.000.000,00	18.511.602.034,71	175.923.611.842,71

Sedangkan jika dihitung berdasarkan nilai ekuitas BUMD per 31 Desember 2015 (*audited*), nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

POT

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.135 Nilai Investasi Permanen Berdasarkan Ekuitas BUMD 2015 (audited)

BUMD	Ekuitas BUMD (audited)	% Kepemilikan	Investasi Permanen 31 Des 2015 (Audited)
PD BPR BKK PURBALINGGA	45.875.147.341,00	44,65%	20.483.253.287,76
PD BPR ARTHA PERWIRA	15.079.078.047,49	100%	15.079.078.047,49
PT BPRS BUANA MITRA PERWIRA	7.630.568.801,00	58,28%	4.447.095.497,22
PD BKK KARANGMONCOL	2.014.316.829,00	47,27%	952.167.565,07
PD PURBALINGGA VENTURA	961.014.969,00	100%	961.014.969,00
PD OWABONG	40.000.306.731,00	100%	40.000.306.731,00
PDAM	60.814.099.635,00	100%	60.814.099.635,00
PD PUSPAHASTAMA	1.424.320.602,00	100%	1.424.320.602,00
PT BPD JATENG CAB. PBG	18.739.000.000,00	Metode Biaya	18.739.000.000,00
PT PRPP JATENG	128.000.000,00	Metode Biaya	128.000.000,00
	175.923.611.842,71		163.028.336.334,54

Sehingga terdapat perbedaan antara nilai penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD berdasarkan perhitungan awal dengan perhitungan berdasarkan laporan keuangan BUMD (*audited*) sebesar Rp12.895.275.508,17 (Rp175.923.611.842,71 – Rp163.028.336.334,54), yang dicatat sebagai beban penurunan nilai investasi permanen.

2) Beban Transfer_

Rp167.988.791.740,00

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Realisasi Beban Transfer Tahun 2015sebesar Rp167.988.791.740,00 terdiri dari:

Tabel 5.136 Realisasi Beban Tranfer-LO Tahun 2015

Uraian	2015 (Rp)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.274.612.000,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.193.150.000,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	162.807.688.240,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	713.341.500,00
Jumlah	167.988.791.740,00

5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

a. EKUITAS AWAL

Ekuitas awal Tahun 2015 sebesar Rp1.590.150.036.251,08 berasal dari saldo ekuitas per 31 Desember 2014 yang telah disajikan kembali.

b. SURPLUS/(DEFISIT) - LO

Surplus - LO Tahun 2015 sebesar Rp279.218.098.538,30 berasal dari total pendapatan LO sebesar Rp1.716.058.294.420,16 dikurangi dengan beban Tahun 2015 sebesar Rp1.436.840.195.881,86.



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

c. KOREKSI EKUITAS LAINNYA

Koreksi ekuitas menggambarkan transaksi selama tahun berjalan yang menambah maupun mengurangi nilai ekuitas bersih Tahun 2015. Total nilai Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2015 sebesar Rp55.643.149.731,22 disebabkan terdapat koreksi tambah sebesar Rp121.260.124.481,95 dan koreksi kurang sebesar Rp65.616.974.750,73, yang daoat dibambarkan sebagai berikut:

1) Koreksi yang menambah nilai ekuitas bersih Tahun 2015, yaitu:

Tabel 5.137 Koreksi yang Menambah Nilai Ekuitas Bersih Tahun 2015

Uraian	2015 (Rp)
Koreksi pencatatan Saldo Awal Kas BOS 2014 dan Jasa Giro BOS	3.351.283.555,00
Koreksi Saldo Awal Dana Cadangan Tahun 2015	122.142.803,00
Koreksi Investasi Non Permanen- Dana Bergulir	154.971.838,00
Koreksi Jurnal Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2014	599.250.005,00
Koreksi Beban Dibayar Dimuka Tahun 2014	10.428.245,00
Koreksi Penambahan Aset Tetap	97.714.115.724,95
Koreksi Akumulasi Penyusutan	13.840.000,00
Koreksi Aset Tidak Berwujud	10.000.000,00
Koreksi Penambahan Aset Lain-Lain	8.954.518.829,00
Koreksi Pengurangan Utang Bunga	9.504.569,00
Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya	84.080.599,00
Koreksi Utang Dalam Negeri	33.773.764,00
Koreksi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO	8.999.338.133,00
Koreksi Pendapatan Hibah - LO	802.876.417,00
Jumlah	121.260.124.481,95

2) Koreksi yang mengurangi nilai ekuitas bersih Tahun 2015, yaitu:

Tabel 5.138 Koreksi yang Mengurangi Nilai Ekuitas Bersih Tahun 2015

Uraian	2015 (Rp)
Koreksi atas Penyetoran Kas Bendahara Penerimaan Tahun 2014	913.729.871,00
Koreksi Piutang Retribusi	234.900.592,00
Koreksi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	3.218.503.745,00
Koreksi Beban Dibayar Dimuka Tahun 2014	1.533.000,00
Koreksi Aset Tetap	56.138.085.124,73
Koreksi Akum Penuyusutan	236.127.892,00
Koreksi Aset Tidak Berwujud	192.165.000,00
Koreksi Aset Lain-lain	1.451.099.496,00
Koreksi Utang Bunga	1.913.393,00
Koreksi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31.860.375,00
Koreksi Utang Belanja	147,00
koreksi Pendapatan Hibah - LO	3.197.056.115,00
Jumlah	65.616.974.750,73



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

d. EKUITAS AKHIR

Ekuitas per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.925.011.284.520,59 yang berasal dari ekuitas awal Rp1.590.150.036.251,08 ditambah dengan surplus - LO sebesar Rp279.218.098.538,30 dan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp55.643.149.731,22.

6. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

a. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksinonanggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dansaldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

Penyajian Laporan Arus Kas didasarkan pada transaksi yang terjadi pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku pejabat pengelola keuangan daerah, kas yang dikelola oleh BLUD, dan kas yang dikelola oleh FKTP terkait dengan kapitasi JKN.

Ikhtisar Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.139 Ikhtisar Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015

	2015	2014
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	259.677.054.023,00	153.494.966.317,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(157.165.302.927,00)	(107.782.681.303,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(5.154.077.541,00)	(37.376.956.011,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(1.204.056.143,00)	3.299.007.989,00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	96.153.617.412,00	36.357.429.947,00
Saldo Awal Kas di BUD	148.325.489.985,00	111.968.060.038,00
Saldo Akhir Kas di BUD	244.479.107.397,00	148.325.489.985,00
Kas Di Bendahara Penerimaan	196.005.743,00	913.729.871,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	34.065.666,00	47.777.818,00
Kas Di Bendahara JKN	7.095.678.207,00	3.649.987.333,00
Kas Di BLUD	1.703.088.698,00	3.988.554.425,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Lainnya	5.734.113.258,00	0,00
Saldo Akhir Kas	259.242.058.969,00	156.925.539.432,00

b. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

1) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2015 sebesar Rp259.677.056.013,00 berasal dari selisih antara arus kas masuk dari aktivitas



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

operasi sebesar Rp1.464.006.039.265,00 dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp1.204.328.983.252,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Tabel 5.140 Ikhtisar Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2015

Uraian	2015	2014
Pendapatan Pajak Daerah	40.706.899.014,00	37.837.517.809,00
Pendapatan Retribusi Daerah	32.466.466.442,00	33.296.583.424,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.306.370.791,00	12.016.649.479,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26.560.615.259,00	21.252.809.867,00
Dana Bagi Hasil Pajak	17.263.378.750,00	26.851.773.288,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	6.628.446.005,00	6.268.440.589,00
Dana Alokasi Umum	805.222.229.000,00	777.989.499.000,00
Dana Alokasi Khusus	72.251.830.000,00	57.267.330.000,00
Dana Penyesuaian	249.255.085.000,00	173.720.857.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	91.414.187.161,00	64.269.725.000,00
Pendapatan Hibah	8.626.737.160,00	6.100.074.277,00
Pendapatan Lainnya	101.303.794.683,00	30.560.406.910,00
Jumlah	1.464.006.039.265,00	1.247.431.666.643,00

- (1) Arus kas masuk dari pendapatan retribusi daerah sebesar Rp32.466.466.442,00 lebih kecil Rp161.981.604,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Rp32.628.448.046,00. Perbedaan ini terjadi karena pendapatan retribusi pelayanan kesehatan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 masih terdapat pada Bendahara Penerimaan Puskesmas (belum disetorkan ke Kas Daerah), tidak diperhitungkan sebagai komponen arus kas masuk dari aktivitas operasi.
- (2) Arus kas masuk dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah sebesar Rp26.560.615.259,00 atau lebih kecil sebesar Rp103.419.714.677,00 dibandingkan dengan nilai Lain-Lain PAD yang Sah pada LRA sebesar Rp129.980.329.936,00.

Perbedaan ini terjadi karena arus kas masuk dari Lain-Lain PAD yang Sah pada LAK tidak memperhitungkan pendapatan yang tidak disertai dengan aliran kas ke Kas Daerah dan aktivitas penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, yang terdiri dari:

Tabel 5.141 Ikhtisar Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015

Uraian	2015
Pendapatan BLUD	64.489.012.974,00
Pendapatan Kapitasi JKN	37.141.230.500,00
Pendapatan Jasa Giro Dana Cadangan	1.146.826.442,00
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	642.644.641,00
Pendapatan dari Pengembalian Belanja JKN 2014 Puskesmas Kemangkon	120,00
Jumlah	103.419.714.677,00



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

b) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Tabel 5.142 Ikhtisar Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2015

Uraian	2015	2014
Belanja Pegawai	794.200.719.054,00	753.383.584.120,00
Belanja Barang	204.987.225.223,00	235.844.635.341,00
Belanja Bunga	9.504.569,00	17.095.745,00
Belanja Subsidi	500.000.000,00	400.000.000,00
Belanja Hibah	32.210.642.689,00	44.328.185.710,00
Belanja Bantuan Sosial	4.432.099.977,00	8.132.728.900,00
Belanja Bantuan Keuangan	163.521.029.740,00	51.816.649.200,00
Bagi Hasil Pajak	3.274.612.000,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi	1.193.150.000,00	13.821.310,00
	1.204.328.983.252,00	1.093.936.700.326,00

- (1) Arus kas keluar berupa belanja pegawai sebesar yang Rp794.200.719.054,00 lebih kecil sebesar Rp4.973.959.500,00 dibandingkan total belanja pegawai pada **LRA** sebesar Rp799.174.678.554,00. Perbedaan tersebut terjadi karena belanja pegawai pada LAK tidak memperhitungkan belanja pegawai BLUD sebesar Rp2.016.581.500,00 dan belanja pegawai JKN sebesar Rp2.957.378.000,00.
- barang (2) Arus kas keluar berupa belanja sebesar yang Rp204.987.225.223,00 lebih kecil sebesar Rp86.194.498.930,00 dibandingkan total belanja barang dan jasa pada LRA sebesar Rp291.181.724.153,00. Perbedaan tersebut terjadi karena belanja barang pada LAK tidak memperhitungkan belanja barang BLUD sebesar Rp58.516.329.871,00 dan belanja barang JKN sebesar Rp27.678.169.059,00.

2) ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Nilai arus kas bersih dari aktivitas non keuangan tahun 2015 sebesar (Rp157.165.302.927,00) berasal dari selisih antara arus kas masuk dari aktivitas non keuangan sebesar Rp642.644.641,00 dengan arus kas keluar dari aktivitas non keuangan sebesar Rp157.807.947.568,00, dengan penjelasan sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

a) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Tabel 5.143 Ikhtisar Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Tahun 2015

Uraian	2015	2014
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	62.949.500,00	3.930.400,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	52.270.200,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	53.547.416,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Hasil Penebangan Pohon	10.000.000,00	600.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Bahan- bahan Bekas Bangunan	463.877.525,00	197.997.400,00
Jumlah	642.644.641,00	202.527.800,00

b) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Tabel 5.144 Ikhtisar Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Tahun 2015

Uraian	2015	2014
Belanja Tanah	5.179.573.602,00 7.152.074.703,00	
Belanja Peralatan dan Mesin	32.647.790.331,00 28.299.585.385,00	
Belanja Gedung dan Bangunan	54.065.785.010,00 31.265.550.350,00	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	65.402.198.125,00 39.009.750.850,00	
Belanja Aset Tetap Lainnya	512.600.500,00 2.258.247.815,00	
Jumlah	157.807.947.568,00	107.985.209.103,00

- (1) Arus kas keluar untuk belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp32.647.790.331,00 lebih kecil Rp8.517.279.478,00 dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada LRA sebesar Rp41.165.069.809,00. Perbedaan ini terjadi karena belanja modal peralatan dan mesin pada LAK tidak memperhitungkan realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada BLUD sebesar Rp5.457.286.791,00 dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin dana JKN sebesar Rp3.059.992.687,00.
- (2) Arus kas keluar untuk belanja gedung dan bangunan sebesar Rp54.065.785.010,00 lebih kecil Rp4.320.553.000,00 dibandingkan dengan realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada LRA sebesar Rp58.386.338.010,00. Perbedaan ini terjadi karena belanja gedung dan bangunan pada LAK tidak memperhitungkan realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada BLUD sebesar Rp4.320.553.000,00.

3) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

arus kas Pemerintah Daerah dan klaim Pemerintah Daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Nilai arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan tahun 2015 sebesar (Rp5.154.077.541,00) berasal dari selisih antara arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp28.849.643.205,00 dengan arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp 34.003.720.746,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan

Tabel 5.144 Ikhtisar Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2015

Uraian	2015	2014
Pencairan Dana Cadangan	28.694.671.367,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	154.971.838,00	294.764.735,00
Jumlah	28.849.643.205,00	294.764.735,00

Penjelasan rinci mengenai pencairan dana cadangan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dapat dilihat pada penjelasan pos-pos LRA poin 1.d.1.b.

b) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan

Tabel 5.146 Ikhtisar Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2015

Uraian	Uraian 2015	
Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	27.508.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	18.940.000.000,00	10.100.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	63.720.746,00	63.720.746,00
Jumlah	34.003.720.746,00	37.671.720.746,00

Arus kas keluar untuk pembentukan dana cadangan pada LAK sebesar Rp15.000.000.000,000 berbeda dengan pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan pada LRA sebesar Rp16.146.826.442,00 atau terdapat selisih sebesar Rp1.146.826.442,00 karena arus kas keluar untuk pembentukan dana cadangan pada LAK tidak memperhitungkan pembentukan dana cadangan yang berasal dari jasa giro dana cadangan, karena prosesnya tidak melibatkan aliran kas keluar dari RKUD.

Penjelasan rinci mengenai pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang dapat dilihat pada penjelasan pos-pos LRA poin 1.d.2.b dan 1.d.2.c.

4) ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Nilai arus kas bersih dari aktivitas non anggaran tahun 2015 sebesar (Rp1.204.058.133,00) berasal dari selisih antara arus kas masuk dari aktivitas non



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

anggaran sebesar Rp123.781.403.369,00 dengan arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp124.985.461.502,00, dengan penjelasan sebagai berikut:
a) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran

Tabel 5.147 Ikhtisar Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2015

Uraian	2015	2014
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	123.733.625.551,00 71.182.561.	
Saldo Sisa UP TA 2014	47.777.818,00 143.236.23	
Jumlah	123.781.403.369,00	71.325.797.795,00

Arus kas masuk dari aktivitas non anggaran berupa Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) terdiri dari:

Tabel 5.148 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran berupa Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2015

Uraian	Jumlah
Dana Jamkesda	1.140.075.000,00
Potongan PFK SP2D LS Tahun 2015:	
Iuran Wajib Pegawai	41.011.283.662,00
Taperum	827.049.000,00
Askes	12.300.884.515,00
Pajak Penghasilan Ps 21	34.667.407.002,00
Pajak Penghasilan Ps 22	724.966.665,00
Pajak Penghasilan Ps 23	529.213.934,00
Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	3.463.153.909,00
Pajak Penghasilan Ps 15	202.500,00
Pajak Penghasilan Ps 26	1.319.600,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	20.534.990.125,00
luran Jaminan Kematian	560.545.108,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	448.436.086,00
Dana Retensi	7.524.098.445,00
Jumlah	123.733.625.551,00

Penjelasan mengenai Sisa Uang Persediaan Tahun 2014 dapat dilihat pada penjelasan poin 4.b.2.a.1.c mengenai Kas di Bendahara Pengeluaran.

b) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran

Tabel 5.149 Ikhtisar Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2015

Uraian	2015	2014
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	124.951.846.926,00	67.981.332.916,00
Saldo Sisa UP TA 2015	33.614.576,00 45.49	
Jumlah	Jumlah 124.985.461.502,00 68.026.789.8	

Arus kas keluar dari aktivitas non anggaran berupa Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) terdiri dari:

P O J

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Tabel 5.150 Ikhtisar Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran berupa Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2015

Uraian	Jumlah
Dana Jamkesda	1.157.550.000,00
Potongan PFK SP2D LS Tahun 2015:	
Iuran Wajib Pegawai	41.011.283.662,00
Taperum	827.049.000,00
Askes	12.300.884.515,00
Pajak Penghasilan Ps 21	34.667.407.002,00
Pajak Penghasilan Ps 22	724.966.665,00
Pajak Penghasilan Ps 23	529.213.934,00
Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	3.463.153.909,00
Pajak Penghasilan Ps 15	202.500,00
Pajak Penghasilan Ps 26	1.319.600,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	20.534.990.125,00
Iuran Jaminan Kematian	560.545.108,00
luran Jaminan Kecelakaan Kerja	448.436.086,00
Dana Retensi	8.724.844.820
Jumlah	124.951.846.926,00

Penjelasan mengenai Sisa Uang Persediaan Tahun 2015 dapat dilihat pada penjelasan poin 4.b.2.a.1.c mengenai Kas di Bendahara Pengeluaran.

Perbedaan nilai Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2015 pada Saldo Sisa UP TA 2014 sebesar Rp47.777.818,00 dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2014 pada Saldo Sisa UP TA 2014 sebesar Rp45.456.890,00, dengan selisih sebesar Rp 2.320.928,00 (Rp47.777.818,00 - Rp45.456.890,00) disebabkan saldo sisa kas Dinas Kesehatan per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.320.928,00 pada Laporan Arus Kas Tahun 2014 belum tersaji. Namun, pada Laporan Arus Kas Tahun 2015, sisa kas Dinas Kesehatan per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.320.928,00 disajikan kembali ke dalam arus kas non anggaran sehingga Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2015 pada Saldo Sisa UP TA 2014 menjadi sebesar Rp47.777.818,00.

c. POSISI KAS DAERAH

Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2015 sebesar Rp259.242.058.969,00, yang terdiri dari:

Tabel 5.151 Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2015

	31 Des 2015
Kas di Kas Daerah:	
Rekening Bank Jateng Purbalingga (1-027-00000-1)	89.479.107.397,00
Deposito di Bank Jateng	133.000.000.000,00
Deposito di BRI	10.000.000.000,00
Deposito di BTN	12.000.000.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	196.005.743,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	34.065.666,00
Kas di BLUD	1.703.088.698,00
Kas di Bendahara JKN	7.095.678.207,00
Kas Lainnya	5.734.113.258,00
Total Kas	259.242.058.969,00



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014